



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 77, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2023-2026

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat memerlukan upaya yang terencana, sinergi, dan berkelanjutan dilakukan melalui rencana aksi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang dapat dipimpin oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional.
6. Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.

13. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
17. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

Penyusunan rencana aksi daerah Penerapan SPM dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan pemenuhan hak Warga Negara terhadap layanan minimal;
- b. menjadi acuan Target Kinerja penyelenggaraan layanan minimal;
- c. menyediakan pembiayaan dalam rangka memenuhi layanan minimal;
- d. pemetaan kondisi dan permasalahan dalam Penerapan SPM;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam mewujudkan layanan minimal;
- f. mempercepat pemenuhan layanan minimal; dan/atau
- g. meningkatkan komitmen PD untuk berperan aktif dalam memberikan layanan minimal.

Pasal 3

Penyusunan rencana aksi daerah Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan:

- a. pemenuhan terhadap jenis layanan minimal; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pemenuhan urusan wajib Pelayanan Dasar.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Rencana aksi daerah Penerapan SPM merupakan dokumen perencanaan Program terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. pengintegrasian terhadap dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan RKA PD;
- e. perumusan strategi dan pemenuhan Penerapan SPM; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.

Pasal 5

Rencana aksi daerah Penerapan SPM disusun dengan berpedoman pada RPJMD, visi-misi, rencana strategis, kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi pada PD.

Pasal 6

- (1) Rencana aksi daerah Penerapan SPM disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL;
 - c. BAB III : RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN
 - d. BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.
- (2) Rencana aksi daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Rencana aksi daerah Penerapan SPM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan rencana aksi daerah Penerapan SPM dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, atau bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 11 Desember 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 19 Desember 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL.....	II
DAFTAR GRAFIK.....	V
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN	2
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH.....	3
1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH	3
1.3.2. TOPOGRAFI	3
1.3.3. HIDROLOGI	3
1.3.4. DEMOGRAFI	5
1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA	6
1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.....	8
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM.....	12
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	15
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	15
2.2.1. Urusan Pendidikan	19
2.2.2. Urusan Kesehatan	27
2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum	33
2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat	39
2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..	44
2.2.6. Urusan Sosial.....	54
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	63
2.2.1. Pendidikan	63
2.2.2. Kesehatan.....	64
2.2.3. Pekerjaan Umum.....	64
2.2.4. Perumahan Rakyat	65
2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	65
2.2.6. Sosial	66
BAB III RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	67
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI.....	67
3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	67
3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	72
3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	75
3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	78
3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	79
3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	83
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM	85
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	122
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM	122
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM.....	127

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1	PDRB ADHK KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020-2022	8
TABEL 1. 2	PDRB ADHB KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020-2022	9
TABEL 2. 1	TARGET INDIKATOR RPJMD	15
TABEL 2. 2	REALISASI SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2022	19
TABEL 2. 3	REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN TAHUN 2022	20
TABEL 2. 4	REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2022	23
TABEL 2. 5	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2022.....	24
TABEL 2. 6	ALOKASI ANGGARAN HIBAH PENDIDIKAN	24
TABEL 2. 7	ALOKASI ANGGARAN SPM INFRASTRUKTUR URUSAN PENDIDIKAN MENURUT DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2022	26
TABEL 2. 8	PERSONIL PENDUKUNG SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2022	27
TABEL 2. 9	REALISASI SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2022	27
TABEL 2. 10	CAPAIA PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN TAHUN 2022	29
TABEL 2. 11	REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	30
TABEL 2. 12	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN KESEHATAN MENURUT DINAS KESEHATAN ...	31
TABEL 2. 13	PERSONIL PENDUKUNG SPM URUSAN KESEHATAN	33
TABEL 2. 14	REALISASI SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	33
TABEL 2. 15	REALISASI SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM MENURUT RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KOTA TANGERANG SELATAN	34
TABEL 2. 16	CAPAIA LAYANAN AIR MINUM	36
TABEL 2. 17	KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN.....	36
TABEL 2. 18	REALISASI SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM MENURUT PENGELOLAAN AIR LIMBAH DENGAN AKSES LAYAK	37
TABEL 2. 19	CAPAIA LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	38
TABEL 2. 20	KONDISI SPALD	38
TABEL 2. 21	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM	39
TABEL 2. 22	PERSONIL PENDUKUNG SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	39
TABEL 2. 23	REALISASI SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	40
TABEL 2. 24	REALISASI SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	40
TABEL 2. 25	RINCIAN CAPAIA PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	42
TABEL 2. 26	PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	43
TABEL 2. 27	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	44
TABEL 2. 28	PERSONIL PENDUKUNG SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	44
TABEL 2. 29	CAPAIA SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	44
TABEL 2. 30	CAPAIA SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	45
TABEL 2. 31	CAPAIA SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	45

TABEL 2. 32	REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	46
TABEL 2. 33	REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA	48
TABEL 2. 34	REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI)	48
TABEL 2. 35	REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN)	48
TABEL 2. 36	DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA.....	48
TABEL 2. 37	DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN.....	50
TABEL 2. 38	REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH SATPOL PP.....	52
TABEL 2. 39	DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM OLEH DINAS PEMADAM KEBAKARAN.....	52
TABEL 2. 40	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53
TABEL 2. 41	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	53
TABEL 2. 42	ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	53
TABEL 2. 43	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	53
TABEL 2. 44	PERSONIL SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....	53
TABEL 2. 45	PERSONIL SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	54
TABEL 2. 46	PERSONIL SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT MENURUT DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	54
TABEL 2. 47	REALISASI SPM URUSAN SOSIAL	54
TABEL 2. 48	REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI.....	55
TABEL 2. 49	DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL.....	61
TABEL 2. 50	ALOKASI ANGGARAN URUSAN SOSIAL	62
TABEL 2. 51	PERSONIL PENDUKUNG SPM URUSAN SOSIAL	63
TABEL 3. 1	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PENDIDIKAN	67
TABEL 3. 2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PENDIDIKAN	69
TABEL 3. 3	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN.....	72
TABEL 3. 4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN	75
TABEL 3. 5	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM	75
TABEL 3. 6	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM	76
TABEL 3. 7	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	78

TABEL 3. 8	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	78
TABEL 3. 9	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN	79
TABEL 3. 10	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN	80
TABEL 3. 11	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANGERANG SELATAN	80
TABEL 3. 12	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	81
TABEL 3. 13	STRATEGI DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL	83
TABEL 3. 14	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM PEMENUHAN CAPAIAN SPM URUSAN SOSIAL	84
TABEL 3. 15	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	85
TABEL 3. 16	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	88
TABEL 3. 17	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	101
TABEL 3. 18	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	104
TABEL 3. 19	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	106
TABEL 3. 20	RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL KOTA TANGERANG SELATAN 2023-2026	112
TABEL 4. 1	EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR SPM	126

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1. 1 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER KECAMATAN TAHUN 2022..... 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2026

RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib Pelayanan Dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah.

Percepatan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara minimal ditegaskan melalui ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan pada Pasal 298 dinyatakan bahwa belanja daerah di prioritaskan untuk mendanai SPM dan untuk melaksanakan mandat ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang mengatur ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pelayanan Dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran SPM setiap tahun. Program Kegiatan dan subkegiatan Penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah sebagai langkah konkret dan instrumen pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM di daerah.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Rencana aksi daerah Penerapan SPM ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan jenis layanan minimal yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

Maksud tujuan dan sasaran penyusunan rencana aksi daerah Penerapan SPM adalah menetapkan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan suatu konsep, Program, atau inisiatif penyediaan layanan minimal ke dalam tindakan nyata. Rencana aksi daerah Penerapan SPM disusun untuk memastikan bahwa ide atau rencana strategis dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Beberapa maksud tujuan dan sasaran penyusunan rencana aksi daerah Penerapan SPM meliputi:

1. Rencana aksi daerah Penerapan SPM membantu mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam menerapkan SPM, sehingga terdapat kejelasan arah Penerapan SPM dan dapat meminimalisir *chaos* dalam pelaksanaan;
2. Rencana aksi daerah Penerapan SPM digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan implementasi melalui penetapan Target dan Indikator Kinerja pemenuhan Target;
3. Rencana aksi daerah Penerapan SPM menentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tindakan atau langkah yang harus diambil, sehingga tidak ada ketidakjelasan tentang siapa yang harus melakukan apa;
4. Rencana aksi daerah Penerapan SPM membantu memetakan alokasi sumber daya seperti waktu, uang, dan personil yang diperlukan pada tataran Penerapan SPM; dan
5. Rencana aksi daerah Penerapan SPM disusun dalam rangka mengidentifikasi permasalahan dan merancang solusi yang tepat dalam Penerapan SPM.

Dengan kata lain, rencana aksi daerah Penerapan SPM sebagai alat dalam memastikan tingkat capaian Penerapan SPM melalui pelaksanaan tindakan yang nyata dan terukur.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 bahwa luas wilayah Kota Tangerang Selatan seluas 164,85 Km². Apabila dilihat dari kecamatan terluas adalah Kecamatan Pondok Aren menempati posisi dengan luas wilayah terbesar, yaitu 29,8 Km² sebesar 18,08% dari luas kota, sedangkan Kecamatan Setu menempati posisi dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 16,76 Km², sekitar 10,17% dari luas kota.

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Banten. Secara geografis Kota Tangerang Selatan yang beribukota di Ciputat, terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30"-06°22'00" Lintang Selatan, dan secara wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Selatan: Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang.

Posisi tersebut menjadikan Kota Tangerang Selatan sebagai kota strategis secara ekonomi karena menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (termasuk didalamnya kawasan Megapolitan Jabodetabek).

1.3.2. Topografi

Sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dengan topografi yang relatif datar pada kemiringan tanah rata-rata 0-3%, sedangkan ketinggian wilayah antara 0-25 mdpl, yang meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Serpong Utara. Sedangkan, Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu memiliki kemiringan 3-8%. Meskipun relatif datar, terdapat beberapa bagian lahan yang bergelombang, salah satunya dapat ditemui di Kecamatan Ciputat Timur.

1.3.3. Hidrologi

Secara garis besar terdapat 2 (dua) sistem perairan alami yaitu perairan hulu dan perairan pantai. Masing-masing sistem mempunyai karakteristik yang khas, baik ditinjau dari daerah asal, kualitas air, maupun pola drainasenya.

Keadaan hidrologi umumnya berkaitan erat dengan keadaan fisiografi daerah dan berpengaruh langsung terhadap sumber daya lahan dan potensinya. Sistem hidrologi Kota Tangerang Selatan terdiri atas:

1. Air permukaan, yaitu air yang mengalir atau muncul di permukaan antara lain sungai, mata air, tampungan air alami dan tampungan buatan.
2. Air tanah, wilayah Kota Tangerang Selatan secara kualitas memiliki kondisi air tanah yang baik, oleh karena itu, banyak penduduk yang masih menggunakannya sebagai air bersih. Potensi air tanah Kota Tangerang selatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031, digunakan sebagai *conjunctive use* pada kawasan yang tidak memiliki atau terbatas sumber air permukaannya, dengan mempertimbangkan kondisi Cekungan Air Tanah (CAT), yang terdiri atas CAT Serang-Tangerang yang merupakan CAT lintas Kabupaten/Kota dan CAT Jakarta yang merupakan CAT lintas Provinsi.

Perumahan warga memiliki rata-rata kedalaman air tanah mencapai 5–10 meter. Terdapat juga penggunaan air tanah dalam, melalui pompa *deep well* pada kawasan-kawasan perumahan baru yang dikelola pengembang swasta.

Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air permukaan berupa sungai dan situ. Sungai yang dimaksud antara lain: Kali Angke, Sungai Pesanggrahan, Sungai Cisadane, ketiga sungai tersebut masuk ke dalam satuan wilayah sungai Ciliwung-Cisadane. Saat ini sungai-sungai tersebut sudah dimanfaatkan sebagai sumber air baku di bawah pengelolaan stakeholder penyedia air bersih untuk kepentingan domestik dan non domestik.

Mengenai gambaran kualitas air sungai dan air tanah di Kota Tangerang Selatan bila mengacu kepada gambaran kualitas air sungai Cisadane sebagai sungai yang terbesar maka didapatkan pencemaran yang cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa parameter.

Berdasarkan kondisi hidrologi tersebut, Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, baik air tanah maupun air permukaan. Potensi air permukaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, baik pemanfaatan untuk keperluan penyediaan air bersih domestik maupun non domestik (sebagai alternatif penyediaan yang lebih berkelanjutan tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas air permukaan) maupun kepentingan pembangunan sarana publik seperti ruang terbuka.

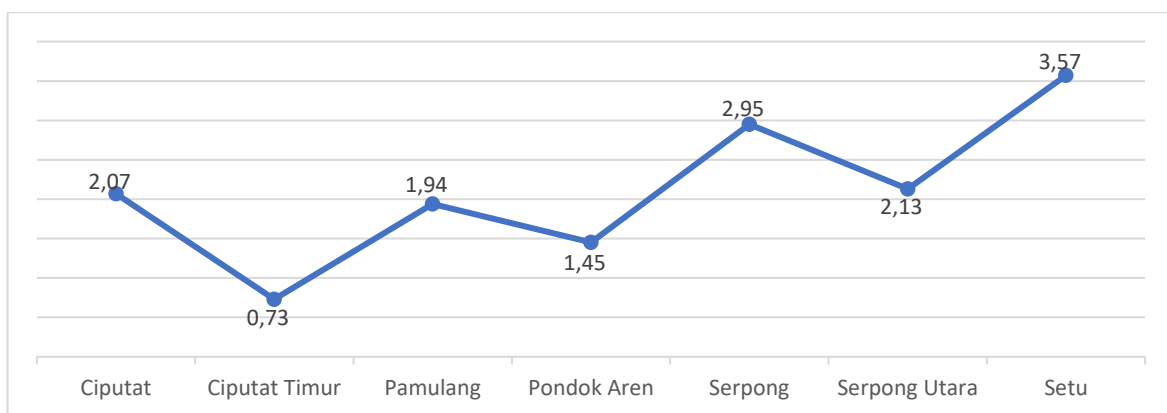
1.3.4. Demografi

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022 Kota Tangerang Selatan, jumlah total penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 1.394.015 jiwa dengan kepadatan 8.362 orang per Km². Kecamatan Pamulang memiliki kepadatan yang paling tinggi, yaitu 11,2 ribu jiwa per Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Setu dengan 5,38 ribu jiwa per Km².

Persebaran penduduk di Tangerang Selatan belum merata, sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Pamulang dan Pondok Aren. Kecamatan Pamulang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sebesar 321.764 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan Pondok Aren sebesar 293.968 jiwa, jumlah penduduk tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kecamatan Setu dengan jumlah penduduk terkecil sebesar 90.207 jiwa.

Pergerakan jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri, melalui pendataan penduduk dengan proses verifikasi data penduduk pada Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 sebesar 1,95% terhadap jumlah penduduk Tahun 2021. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, 2022

Pada karakteristik Persebaran Penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk relatif terkendali dengan jumlah persebaran penduduk laki-laki sebesar 695.843 orang atau 49,92% dan persebaran penduduk perempuan sebesar 698.172 atau 50,08%.

Komposisi penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 995.610 jiwa atau 71,42%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 328.874 jiwa atau 23,59% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 69.531 jiwa atau 4,99%. Kondisi kependudukan dengan dominasi usia produktif tersebut dapat menjadi sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kepentingan peningkatan ekonomi, serta pembangunan kota secara optimal, dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

1. Risiko bencana gempa bumi di Kota Tangerang Selatan memiliki kelas risiko gempa bumi tinggi dengan luas total risiko gempa bumi adalah 16.458,55 Ha. Hal tersebut dikarenakan terdapat 3 (tiga) Kecamatan dengan kelas risiko tinggi, yaitu Kecamatan Serpong karena memiliki luas risiko tinggi 0,99 Ha. Sedangkan Kecamatan dengan Luas Risiko Gempa Bumi terluas, yaitu Kecamatan Pondok Aren dengan Kelas Risiko Sedang. Hasil risiko bencana gempa bumi didapat berdasarkan hasil analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disarankan untuk meminimalisir risiko gempa bumi adalah dengan melakukan pengembangan sistem peringatan dini gempa bumi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan tahan gempa bumi.
2. Risiko bencana banjir di Kota Tangerang Selatan berada pada kelas sedang dengan luas risiko banjir adalah 1.596,78 Ha. Adapun kecamatan Pondok Aren memiliki luas risiko paling luas yaitu 245,61 Ha begitupun dengan masing masing luas risiko rendah, sedang dan tinggi paling luas ada di Kecamatan Pondok Aren dengan luas masing-masing adalah 118,80 Ha, 125,73 Ha dan 245,61 Ha. kelas risiko tersebut didapat dari hasil analisis bahaya, analisis kerentanan, dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan bencana banjir di Kota Tangerang Selatan. Salah satu rekomendasi mitigasi yang disarankan antara lain dengan meningkatkan kapasitas saluran drainase di setiap wilayah, memperbaiki sistem jaringan air, menambah penampungan air, perkuatan aturan mengenai pelestarian sempadan sungai, pelertarian hulu sungai, pembangunan tanggul, dan pengurangan aktivitas masyarakat pada area dekat sungai.

3. Risiko bencana tanah longsor Kota Tangerang Selatan tergolong rendah dengan luas 57,06 Ha. Hal tersebut dikarenakan dari setiap kecamatan seluruh kelurahannya memiliki tingkat risiko tanah longsor yang rendah dan dominasi kelerengan di Kota Tangerang Selatan adalah 0-8%. Adapun risiko tanah longsor terluas berada di Kecamatan Setu, yaitu 31,77 Ha dengan kelas rendah. Hasil kelas risiko tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan bencana tanah longsor di Kota Tangerang Selatan. Rekomendasi yang disarankan untuk meminimalisir risiko tanah longsor adalah pengembangan sistem peringatan dini area-area mana saja yang berpotensi tanah longsor pada saat datangnya hujan, perbaikan turap-turap, perkuatan aturan terkait dilarangnya pendirian area terbangun di tanah yang kurang stabil dan dekat sungai.
4. Risiko bencana cuaca ekstrim di Kota Tangerang Selatan berada pada kelas risiko sedang dengan total luas risiko cuaca ekstrem adalah 16.418,88 Ha. Adapun Kecamatan Pondok Aren memiliki luas risiko cuaca ekstrim paling luas, yaitu 2.954,61 Ha dari luas keseluruhan risiko cuaca ekstrim adalah 16.418,88 Ha atau 18% dari luas total risiko bencana cuaca ekstrim. Rekomendasi yang disarankan untuk meminimalisir risiko cuaca ekstrim adalah dengan melakukan pengembangan sistem peringatan dini cuaca ekstrim kepada setiap masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari bencana.
5. Risiko bencana kekeringan di Kota Tangerang Selatan berada pada kelas rendah dengan luas 16.478,01 Ha. Adapun Kecamatan Pondok Aren memiliki risiko terluas, yaitu 2.975,13 Ha. Hasil risiko tersebut didapat dari hasil analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan bencana kekeringan di Kota Tangerang Selatan.
6. Risiko bencana kebakaran gedung dan permukiman di Kota Tangerang Selatan berada risiko Kota Tangerang Selatan terhadap bencana kebakaran gedung dan permukiman adalah sedang dengan luasan risiko sebesar 13.855,05 Ha. Kecamatan Ciputat Timur adalah kecamatan dengan tingkat risiko kelas sedang dengan luasan tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu seluas 3.065,13 Ha. Hasil kelas risiko tersebut didapatkan dari analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan kebakaran gedung dan permukiman di Kota Tangerang Selatan.
7. Risiko bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Tangerang Selatan memiliki kelas risiko epidemi sedang dengan luas 10.826,82 Ha hal tersebut dikarenakan setiap kecamatan berada pada kelas sedang. Adapun kecamatan dengan risiko epidemi terluas berada di Kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.113,36 Ha. Hasil kelas risiko epidemi didapatkan dari analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan epidemi dan wabah penyakit seperti lokasi fasilitas kesehatan dan lainnya yang ada di Kota Tangerang Selatan.

8. Risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Tangerang Selatan ada pada kelas sedang dikarenakan setiap kecamatan berada pada kelas sedang. Adapun luas risiko bencana kegagalan teknologi adalah 16.463,61 Ha. Kecamatan dengan risiko terluas ada di Kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.970,54 Ha. Hasil kelas risiko kegagalan teknologi didapatkan dari analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan kegagalan teknologi seperti dampak nuklir dan lain sebagainya yang ada di Kota Tangerang Selatan.
9. Risiko bencana konflik sosial di Kota Tangerang Selatan memiliki kelas risiko sedang dikarenakan dari 7 (tujuh) Kecamatan terdapat 6 (enam) Kecamatan yang berada pada kelas sedang. Adapun luas total risiko konflik sosial di Kota Tangerang Selatan adalah 449,64 Ha dan risiko konflik sosial terluas berada di Kecamatan Ciputat dengan luas 137,43 Ha. Hasil kelas risiko tersebut didapatkan dari analisis bahaya, analisis kerentanan dan analisis kapasitas yang berkaitan dengan konflik sosial di Kota Tangerang Selatan.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah 1 (satu) indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan berdasarkan harga konstan sebesar 66,021,910 juta rupiah mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 62,364,157.6 juta rupiah menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara tren mengalami kenaikan.

Tabel 1. 1 PDRB ADHK Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	111,514	115,722.6	117,78
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	4.619,002	4,660,672.1	5.037.650
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	56,337	58,742.7	64,880
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,845	31,971.8	33,010
6.	Konstruksi	8,005,037	8,842,759.1	9,384,800
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,370,094	9,805,845.9	10,535,02

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,726,338	1,900,574.8	2, 039,460
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,699,610	1,782,512.0	1,939,110
10.	Informasi dan Komunikasi	10,590,768	11,288,912.7	12,040,080
11.	Jasa Keuangan	802.568,20	841,803.4	843,680
12.	Real Estate	11,449,161.42	11,771,733.2	12,503,610
13.	Jasa Perusahaan	1,932,879.92	1,904,294.9	2,038,170
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611,031.30	579,949.7	622,550
15.	Jasa Pendidikan	4,352,738.35	4,306,251.9	4,250,790
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,609,982.78	2,880,986.1	2,888,520
17.	Jasa Lainnya	1,570,392.85	1,591,424.6	1,682,770
Produk Domestik Regional Bruto		59,537,303.12	62,364,157.6	66,021,910

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023

Pada tahun 2022, tercatat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tangerang Selatan berdasarkan harga berlaku sebesar 96,136,883 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2021 sebesar 88,065,802 juta rupiah.

Tabel 1. 2 PDRB ADHB Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2022

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	179,602	189,255.4	200.23
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	6,512.54	6,658,226.8	7,654.57
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	110.94	116,310.5	129.33
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35.50	38,375.2	39.96
6.	Konstruksi	13,122.92	15,084,491.5	17,130.72
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,370,352.69	14,216,206.6	16,082.35
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,608,954.24	2,970,185.8	3,369.56
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,367,778.20	2,499,636.2	2,758.77
10.	Informasi dan Komunikasi	9,202,263.48	9,802,011.5	10,504.42
11.	Jasa Keuangan	1,222,599.88	1,296,734.0	1,366.81
12.	Real Estate	15,291,452.41	15,922,733.3	16,995.56
13.	Jasa Perusahaan	3,118,054.14	3,126,053.0	3,430.07
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,172,000.27	1,144,314.3	1,276.89
15.	Jasa Pendidikan	7,733,938.04	7,720,422.4	7,639.42
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,917,950.64	4,415,992.6	4,605.52
17.	Jasa Lainnya	2,584,372.88	2,662,983.5	2,952.69
Produk Domestik Regional Bruto		82,551,232.54	87,863,932.5	96,136.88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2023

Struktur perekonomian Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 2020-2022 didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama, yaitu Konstruksi, Real Estate, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi sektor Konstruksi juga mengalami fluktuatif pada kisaran antara 15,90%-17,82%. Kontribusi sektor real estate fluktuatif pada kisaran antara 17,58%-18,52%, Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga fluktuatif pada kisaran antara 16,00%-16,73%. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kurun waktu tahun 2016-2021, trend pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 terpuruk akibat wabah COVID-19 sebesar -1.01%, mampu bangkit pada tahun 2021 sebesar 4.77% dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 5.82%.

2. Kondisi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Saat ini, perhitungan IPM mengalami penyesuaian, terutama pada dimensi pengetahuan. Sebelumnya pada dimensi pengetahuan Badan Pusat Statistik menggunakan indikator Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah, namun indikator tersebut disesuaikan dan diganti menjadi Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah. Berdasarkan metode baru capaian IPM pada tahun 2020 sebesar 81,36 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar 81,95. Tingginya capaian IPM Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa memiliki kualitas SDM yang dapat diandalkan.

Adapun capaian IPM Kota Tangerang Selatan selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.4 Komponen Pembentuk IPM Kota Tangerang Selatan Tahun 2018-2022

Komponen IPM	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	72,26	72,41	72,47	72,47	72.78
Angka Harapan Lama Sekolah	14,42	14.43	14,47	14,66	14.67
Rata-rata lama sekolah	11,78	11,8	11,81	11,82	11.84
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	15,672	15,988	15,667	15,751	15,997
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,17	81,48	81,36	81,60	81.95

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan 2023

Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 dilihat dari 3 (tiga) indikator pendukung yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks pengeluaran dengan uraian sebagai berikut:

- a) Indeks Pendidikan pada tahun 2022 didapatkan dari 2 (dua) indikator, yaitu nilai rata-rata lama sekolah (RLS) dan nilai harapan lama sekolah (HLS). Nilai RLS pada tahun 2022 penduduk Kota Tangerang Selatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 11,82 tahun. Dengan kata lain rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh Pendidikan selama 11,84 tahun, atau hampir menamatkan kelas XII. Angka harapan lama sekolah (HLS) di Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sebesar 14,67 tahun, ini berarti rata-rata anak usia 7 (tujuh) tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,67 tahun atau setara dengan akademi/perguruan tinggi di tingkat Diploma Tiga (D-3). Capaian nilai HLS dan RLS Kota Tangerang Selatan didukung dari Program-Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.
- b) Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Tangerang Selatan 2022 sebesar 72,78 meningkat dibandingkan dengan nilai AHH 2021, Nilai 72,47 memiliki arti bahwa peluang bayi yang lahir di tahun 2022 memiliki peluang untuk hidup hingga mencapai usia 72 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran untuk sehat dari masyarakat Kota Tangerang Selatan cukup tinggi, selain itu juga sarana dan prasarana kesehatan yang ada semakin memadai yang ditunjang dari Program-Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.
- c) Indeks Pengeluaran dihitung dengan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) dan pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 15,997. Nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai indeks pengeluaran tahun 2020 dengan nilai 15,667. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk Kota Tangerang Selatan sebagai output dari semakin membaiknya perekonomian.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Rencana aksi daerah Penerapan SPM disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian Penerapan SPM pada tahun sebelumnya (n-1). Dalam pelaksanaannya tim Penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan Penerapan SPM. Strategi tim Penerapan SPM dalam menyusun rencana aksi daerah Penerapan SPM harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota Tangerang Selatan yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan rencana aksi daerah Penerapan SPM adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi rencana aksi daerah Penerapan SPM yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Kota Tangerang Selatan dalam Penerapan SPM telah menetapkan Tim Penerapan SPM melalui Keputusan Wali Kota Nomor 402 Tahun 2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut.

Tabel 1.5 Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Jabatan	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Pembina	I. Wali Kota Tangerang Selatan II. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan	Pembina memiliki tugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah dan hasil capaian Penerapan SPM Kota Tangerang Selatan.
Ketua	Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan	1. merumuskan kebijakan dan strategi Penerapan SPM Kota Tangerang Selatan; 2. melakukan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kota Tangerang Selatan; 3. mengoordinir pelaksanaan Penerapan SPM dengan PD pengampu SPM; 4. mengoordinir pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan analisa rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 5. mengoordinir Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM; dan 6. melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Wali Kota.

Jabatan	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tangerang Selatan.	membantu Ketua dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyusunan SPM Kota Tangerang Selatan.
Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan penyusunan laporan Penerapan SPM Kota Tangerang Selatan; 2. mengoordinasikan pendataan, pemuktakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; dan 3. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Wali Kota.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Kota Tangerang Selatan; 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan; 4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan; 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan; 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan; 8. Kepala Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan; 9. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan; 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun rencana aksi Penerapan SPM; 2. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 3. mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. melakukan sosialisasi penerapan pelayanan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; 5. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan pencapaian SPM Kota Tangerang Selatan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan 6. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM di Kota Tangerang Selatan.

Jabatan	Penanggung Jawab	Uraian Tugas
	<div>11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan;</div> <div>12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan;</div> <div>13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;</div> <div>14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan;</div> <div>15. Unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebanyak 1 (satu) orang; dan</div> <div>16. Unsur PD/Unit Kerja dan Instansi Terkait lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.</div>	
Sekretariat	Subkoordinator Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.	<div>1. Ketua Ketua memiliki tugas mengoordinir fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM.</div> <div>2. Anggota Anggota memiliki tugas:<div><div>a. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam hal administrasi dan dokumentasi surat-menyerurat, bahan pustaka, dokumen rapat, dan lainnya pada pelaksanaan SPM;</div><div>b. memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM; dan</div><div>c. melaksanakan tugas lain pada sekretariat.</div></div></div>

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
7	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,55%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai dengan standar minimal 1 kali yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu satu tahun	90,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	32,00	32,00	31,88	31,86	31,84	31,82	31,82
12	Angka Kematian Bayi per Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	0,80	0,80	0,79	0,78	0,77	0,76	0,76
13	Prevalensi Stunting Balita	15,39	14,92	14,45	14,00	13,98	13,69	13,69
14	Prevalensi Kurang Energi Kronis Pada Ibu Hamil	3,93	3,93	3,92	3,91	3,90	3,89	3,89
16	Prevalensi balita gizi buruk	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	78,14	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00

[illegible]

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir RPJMD
33	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449	318.449
34	Meningkatnya cakupan layanan penanganan Kebakaran kabupaten/kota	26,41%	26,41%	30,79%	35,19%	39,59%	39,59%	39,59%
Sosial								
35	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	n/a	5 KK	5 KK	5 KK	5 KK	5 KK	25 KK
38	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak terlantar yang tertangani dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Persentase Korban Bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

2.2.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan kondisi pemenuhan Penerapan SPM diatas, realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi Capaian Target (orang)	Persentase
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP, MTs)	139,814	139,544	99.81%
		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	68,443	63,780	93.19%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP, MTs)	<u>6,534</u>	<u>6,534</u>	<u>100%</u>
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Usia Dini	45,256	31,606	70%
Jumlah			260.047	241.464	97.50%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa realisasi Pendidikan Dasar dengan indikator “Jumlah warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida’iyah (MI)” dan “Jumlah warga negara usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)” sebesar 96,5%. Keduanya secara kumulatif disandingkan dengan jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas).

Realisasi Pendidikan Kesetaraan sebanyak 6.534 orang telah terfasilitasi seluruhnya dengan rincian 6.534 orang dengan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan sebesar 3,1%. Rendahnya angka keikutsertaan pada pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa Program Belajar 12 (dua belas) tahun Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil dilaksanakan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan indikator capaian layanan Jumlah warga negara usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sejumlah 45.256 orang sebagai Target layanan PAUD dan telah terlayani dalam PAUD sebesar 31.606 orang dengan persentase capaian sebesar 70%. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak mengikuti PAUD sebesar 13.650 orang atau 30%.

Dalam realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan sebagaimana tabel 2.2 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2022

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan	2	176.109.000	2	149.579.000		85%	APBD
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	1	115.761.970	1	102.923.400	n/a	89%	APBD
8	Jumlah Kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan	1	38.029.000	1	34.079.000	n/a	90%	APBD
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan	3	266.380.000	3	264.630.000	n/a	99%	APBD
10	Jumlah Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
11	jumlah Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan	4	266.380.000	4	258.386.000	n/a	97%	APBD
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	516	1.265.500.000	516	1.265.500.000	n/a	100%	n/a
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	11970	2.992.704.000	11970	2.951.910.000	n/a	99%	n/a

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan	2	154.892.000	2	106.720.000	n/a	69%	n/a
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
21	Jumlah Kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan	1	25.142.100	1	20.577.000	n/a	82%	n/a
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik	1.333	599.850	1.039	46.755.000	n/a		n/a
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Unit komunitas	4	447.540.000	4	307.295.000	n/a	69%	n/a

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	9	285.113.000	9	221.336.000	n/a	78%	n/a
28	Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Jumlah Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	jumlah Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	16.571.000	1	14.005.800	n/a	85%	n/a
32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	35167	86.165.532.144	35167	84.974.150.410	n/a	99%	n/a
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	29976	7.494.000.000	29976	7.195.000.000	n/a	96%	n/a
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik	1	11.386.000	1	8.700.000	n/a	76%	n/a

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	2	66.850.000	2	52.850.000	n/a	79%	n/a
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
41	Jumlah Kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	2	29.332.450	2	29.332.450	n/a	n/a	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

Dalam pemenuhan mutu layanan sebagaimana tabel 2.3 diatas ditunjang berdasarkan Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Kebutuhan Data untuk Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRIST EK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3	3	0	5	44	
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	1232	1232	0	33	3458	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan dianggarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Layanan	Alokasi Anggaran	Realisasi Alokasi Anggaran	Persentase
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	154,120,215,610,00	152,462,465,746	98,92%
		Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SMP	86,490,608,250	82,997,125,554	95,96%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	8,966,569,572	8,339,273,810	93,00%
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Usia Dini	16.593.205.412,00	14,441,361,400	87,03%
4	Penunjang Pelaksanaan Urusan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99.081.297.144	97,231,247,410	98,13%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	395,608,852,983	350,130,899,966	88,50%
Total			760,860,748,971	705,602,373,886	92.73%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan 2023

Selain itu terdapat anggaran hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjang pelaksanaan layanan dasar pendidikan sebesar Rp 1.800.000.000, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 6 Alokasi Anggaran Hibah Pendidikan

No.	Nama Penerima	Rencana Penggunaan Dana	Program	Pagu
A.	HIBAH UANG			
1	Yayasan Pendidikan Dan Sosial (Yapensos) Al - Biruni Ciputat	Kegiatan dan Operasional	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
2	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak " Qothrunnada"	Pembelian Komputer dan Laptop	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000

No.	Nama Penerima	Rencana Penggunaan Dana	Program	Pagu
3	Madrasah Diniyah Takmiliyah "Al-Intiba"	Pembangunan Gedung dan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
4	Ikatan Pendidik Al -Qur'An (IPQ)	Kegiatan dan Operasional	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
5	Yayasan Panti Asuhan Bani Abbas	Rehab Gedung Asrama	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
6	Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT)	Kegiatan dan Operasional FKDT	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
7	Mi Nurul Akhyar (Yayasan Pendidikan Islam Al Nuuriyah)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
8	Yayasan Majelis Dzikrus Sholawat Wal Manaqib	Pembangunan Gedung Utama	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
9	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Mauzah 'Ali	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
10	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Falah Muncul	Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
11	Mis Al-Khaeriyah - Yayasan Islam Al Hidayatul Khaeriyah (Yaikha)	Pembangunan Gedung Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
12	Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren Al Amanah Al Bantani	Pembangunan Asrama Santri	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
13	Yayasan Miftahul Ulum Mi Tarbiyatul Athfal	Pengembangan dan Pembangunan Sarpras	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
14	Mis Raudhatul Muta Alimin	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
15	Yayasan As Syukri	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
16	Mi Nurul Falah (Yayasan Pendidikan Islam Yatim Dan Duafa)	Pembangunan Perpustakaan dan Sarana Prasarana	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
17	Ponpes Al Tsaniyyah	Pembangunan Asrama Putra	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
18	MIS Yapita	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
19	MI Raudhatul Jannah	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
20	DPD Asosiasi Guru Pendidik Agam Islam Indonesia Kota Tangerang Selatan 19616636	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50,000,000
21	Yayasan Daarul Hidayah	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
22	Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah (Yayasan Keranda Hijau Al-Hidayah)	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
23	MI. Tarbiyah Islamiyah (Ypi. Al-Sa'Adah)	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000

No.	Nama Penerima	Rencana Penggunaan Dana	Program	Pagu
24	Madrasah Diniyah Taklimiyah Awaliyah Al Ghulaam	Pembangunan Kamar Mandi	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
25	Yayasan Al Amaliyah Muchlisin	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
26	Yayasan Pendidikan Islam Mdta Unwaanul Falah	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
27	Yayasan Pendidikan Al Ubaidillah	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
28	Yayasan Pendidikan Islam Mdta Unwaanul Falah Imam Firdaus	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
29	Yayasan Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta Tangerang Selatan	Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Swasta	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	50,000,000
30	MI Nurul Ghosyiyah	Renovasi/Rehabilitasi Gedung	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
31	MI Nurul Islam (Nurul Islam Primary School)	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
32	Yayasan Nur Sabilul Hidayah	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
33	Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syifa	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
34	SMP Muhammadiyah 44 Pamulang	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
35	Dewan Kesenian Tangerang Selatan	Kegiatan dan Operasional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	50,000,000
36	Taman Pendidikan Al-Qur'An (TPQ) Arsa Al - Mubarakah S3	Pembangunan Ruang Kelas	Program Pengelolaan Pendidikan	50,000,000
Jumlah				1,800,000,000

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

Selain itu terdapat alokasi anggaran menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang ditujukan untuk menunjang penyediaan infrastruktur pendidikan sebesar Rp 71,715,056,864 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Alokasi Anggaran SPM Infrastruktur Urusan Pendidikan Menurut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2022

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	47,103,753,414	46,158,215,910	99,73
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24,611,303,450	24,611,194,000	99,99
Total		71,715,056,864	70,769,409,910	99,89

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM didukung sumber daya personil yang ada pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 8 Personil Pendukung SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	17 Orang
2	Jabatan Fungsional (Guru)	3513 Orang
3	Jabatan Pelaksana	17 Orang
4	Non ASN (Staf)	137 Orang
5	Non ASN (Guru)	2558 Orang
Total		6252 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2.2. Urusan Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, realisasi layanan yang sesuai dengan ketentuan standar Pelayanan Dasar Kesehatan terlaksana dengan baik. Berikut data capaian layanan dasar Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Target	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentasi ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	23.092	23.092	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Presentasi ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	21.331	21.331	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentasi bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	20.315	20.315	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	129.747	129.747	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	229.219	229.219	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	913.251	913.251	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91.012	91.012	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	282.924	282.924	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian Target	Persentase
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38.066	38.066	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.761	1.761	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Persentase Orang Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	31.261	31.261	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai standar	33.472	33.472	100
Jumlah			1,815,451	1,815,451	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Pada pelayanan kesehatan dasar yang berkaitan dengan siklus hidup yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, dan pelayanan kesehatan usia lanjut capaiannya sebesar 100%, hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Berbagai upaya masif dilakukan untuk mendukung capaian tersebut antara lain peningkatan monitoring dan evaluasi Program kesehatan ibu, bayi, dan balita yang dilakukan secara berkala dari Fasyankes tingkat pertama ke Fayankes tingkat rujukan, upaya pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, OJT dan bimbingan teknis, serta memperkuat Program unggulan yaitu ‘Ngider Sehat’, selain itu juga tidak lepas dukungan dan koordinasi dari lintas sektor dan lintas Program dalam rangka percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada realisasi capaian pelayanan penyakit tidak menular, yakni: pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus juga mencapai 100%, hal ini sejalan dengan percepatan skrining kesehatan khususnya pada penyakit hipertensi dan diabetes melitus pada masyarakat dengan penguatan pemberdayaan kader kesehatan dalam melaksanakan deteksi dini pencegahan penyakit. Selain itu penguatan Kerjasama lintas sektor dan lintas Program dalam setiap skrining kesehatan. Untuk capaian pelayanan kesehatan ODGJ memperkuat pemberdayaan Kader Kesehatan untuk penemuan kasus ODGJ di Masyarakat.

Sedangkan pada pelayanan kesehatan penyakit menular, yaitu pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) capaian juga sebesar 100% karena tahun ini pelacakan dan skrinning kasus dapat dilaksanakan secara langsung, sehingga percepatan pelaksanaan Kegiatan dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan sebagaimana table 2.9 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan
Tahun 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.092	11.555	50	1,174,225,400	95.347.000	8,12	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.331	10.668	50	263,124,000	12.210.000	4,64	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.315	10.611	52	151,972,000	31.203.000	20,53	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	129.747	64.875	50	1,254,147,000	157.642.000	12,57	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	229.219	229.219	100	842,905,000	37.563.000	4,46	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	913251	713547	78,13	117.760.000	78.629.000	66,8	APBD dan APBN (DAK Non Fisik)
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	91.012	45.511	50	229.334.000	19.533.000	8,52	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	282924	171417	60,59	11.705.500	11.697.000	99,9	APBD
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	38066	31976	84,00	6.477.500	6.466.000	99,8	APBD
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1761	1527	86,71	7.647.500	7.630.000	99,8	APBD
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberculosis	10.514	9.573	91,10	106.129.800	71.253.105	67,1	APBD

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	35.491	14.960	42	71.234.500	37.950.000	53,3	APBD

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Dalam melaksanakan pemenuhan mutu layanan Urusan Kesehatan sebagaimana table 2.10 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS DAN KETERSEDIAAN	
1	2	3	4	5	6
1	Serpong	Rumah Sakit	7	Dokter Umum; 227 Dokter Spesialis: 227	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 8
		Klinik	53	Dokter Gigi: 62, Dokter Gigi Spesialis: 15	Apoteker: 75 Sarjana Teknis Kefarmasian: 80
		Puskesmas	6	Perawat: 680	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 17
		Posyandu	89	Bidan: 180	Tenaga Gizi: 18
2	Serpong Utara	Rumah Sakit	4	Dokter Umum; 109 Dokter Spesialis: 1118	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 6
		Klinik	44	Dokter Gigi: 40, Dokter Gigi Spesialis: 13	Apoteker: 36 Sarjana Teknis Kefarmasian: 34
		Puskesmas	3	Perawat: 320	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 11
		Posyandu	73	Bidan: 90	Tenaga Gizi: 11
3	Pondok Aren	Rumah Sakit	5	Dokter Umum; 185 Dokter Spesialis: 315	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 10
		Klinik	74	Dokter Gigi: 92, Dokter Gigi Spesialis: 61	Apoteker: 60 Sarjana Teknis Kefarmasian: 70
		Puskesmas	6	Perawat: 786	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 18
		Posyandu	210	Bidan: 193	Tenaga Gizi: 32
4	Ciputat	Rumah Sakit	7	Dokter Umum; 125 Dokter Spesialis: 142	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 7
		Klinik	21	Dokter Gigi: 29, Dokter Gigi Spesialis: 9	Apoteker: 33, Sarjana Teknis Kefarmasian: 74
		Puskesmas	5	Perawat: 421	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 17
		Posyandu	138	Bidan: 199	Tenaga Gizi: 19
5	Ciputat Timur	Rumah Sakit	2	Dokter Umum; 99 Dokter Spesialis: 95	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 5
		Klinik	22	Dokter Gigi: 34, Dokter Gigi Spesialis: 19	Apoteker: 15, Sarjana Teknis Kefarmasian: 20
		Puskesmas	5	Perawat: 296	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 7
		Posyandu	122	Bidan: 81	Tenaga Gizi: 11

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS DAN KETERSEDIAAN	
1	2	3	4	5	6
6	Pamulang	Rumah Sakit	6	Dokter Umum; 163 Dokter Spesialis: 122	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 12
		Klinik	33	Dokter Gigi: 58, Dokter Gigi Spesialis: 7	Apoteker: 37, Sarjana Teknis Kefarmasian: 45
		Puskesmas	7	Perawat: 513	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 15
		Posyandu	161	Bidan: 189	Tenaga Gizi: 27
7	Setu	Rumah Sakit	0	Dokter Umum; 49 Dokter Spesialis: 23	Tenaga Sanitasi Lingkungan: 4
		Klinik	13	Dokter Gigi: 29, Dokter Gigi Spesialis: 0	Apoteker: 24, Sarjana Teknis Kefarmasian: 14
		Puskesmas	3	Perawat: 89	Tenaga Kesehatan Masyarakat: 7
		Posyandu	52	Bidan: 59	Tenaga Gizi: 8

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan anggaran SPM Urusan Kesehatan untuk Program utama dan Program penunjang, dengan mekanisme jumlah Program dan mekanisme yang tidak dapat dibagi secara *limited* terhadap rincian Kegiatannya, sehingga dibagi secara merata pada 12 (dua belas) indikator. Anggaran yang ditetapkan tersebut hanya untuk Kegiatan non fisik layanan dasar SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Adapun alokasi anggaran yang bersumber dari APBD adalah Rp726,940,204,970 termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp32,924,990,300, dimana DAK Fisik adalah Rp15,659,694,300 dan DAK Non Fisik adalah Rp17,265,296,000. Adapun rincian anggaran Penerapan SPM Kota Tangerang Selatan per jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Menurut Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Capaian		
		Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Alokasi Anggaran	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	61.700.864.264	54.288.916.380	88 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.436.811.341	53.158.396.180	88 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.284.408.559	53.152.618.180	88 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Capaian		
		Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Alokasi Anggaran	Persentase
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	61.557.290.559	54.274.798.180	88 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	61.107.326.059	53.832.701.930	88 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.498.144.148	53.326.840.180	88 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.352.170.559	53.218.793.495	88 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.134.542.059	53.022.437.180	88 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.129.314.059	53.017.206.180	88 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.234.874.059	53.089.120.180	88 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.303.022.709	53.168.843.885	88 %

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Capaian		
		Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Alokasi Anggaran	Persentase
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	60.201.454.559	53.081.420.180	88 %
Jumlah				726,940,204,970	640,632,092,130	88 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Dalam upaya mendorong pencapaian SPM didukung sumber daya personil yang ada pada lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 13 Personil Pendukung SPM Urusan Kesehatan

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	91 Orang
2	Jabatan Fungsional	372 Orang
3	Jabatan Pelaksana	289 Orang
4	Non ASN	2.463 Orang
Total		3.215 Orang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Target yang telah dirumuskan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tercapai 100% sesuai dengan Target yang telah ditetapkan. Adapun data realisasi dari SPM Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 14 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		Persentase
		Indikator Kinerja	Target (KK)	Realisasi Capaian Target (KK)	
1	Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	438.407	404.650	92,3%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		Persentase
		Indikator Kinerja	Target (KK)	Realisasi Capaian Target (KK)	
2	Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air limbah melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di seluruh kabupaten/kota	438.407	381.551	87,24%

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Bahwa di Tangerang Selatan secara umum pencapaian pelayanan air minum mencapai dimana pelayanan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Tangerang Selatan merupakan capaian skema Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 15 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Menurut Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		Persentase
		Indikator Kinerja	Target (KK)	Realisasi Capaian Target (KK)	
1	Air Minum	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65.761	48.558	12%
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	372.656	356.092	80,3%
Jumlah			438. 407	404.650	92,3%

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pelayanan SPAM bukan jaringan perpipaan baru dapat menjangkau 80,3% diakibatkan kendala ada beberapa lokasi wilayah yang memang memiliki air sumur dangkal yang terbatas baik dari segi kualitas ataupun kuantitas dari air tanahnya, sedangkan pelayanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan mengacu kepada dokumen Rencana Induk SPAM (RISPAM).

Pelayanan melalui jaringan perpipaan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 masih sejumlah $\pm 12\%$ dan memiliki Target untuk 5 tahun kedepan yaitu pada tahun 2024 yaitu sejumlah $\pm 15\%$. Namun sesuai kondisi pada tahun berjalan terdapat pandemi Covid-19 (kurang lebih 3 tahun yaitu pada tahun 2019-2021) yang menyebabkan Target capaian tersebut sulit untuk tercapai.

Perumahan yang dibangun oleh pengembang (BSD, Bintaro, Alam Sutera) melalui Badan Usaha Swasta (BUS) bersamaan dengan Pelayanan Dasar lainnya seperti penerangan jalan, sampah dan keamanan lingkungan menggunakan air curah kerjasama dengan Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) yang merupakan BUMD milik Kabupaten Tangerang telah terpenuhi akses SPAM seluruhnya.

Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Minum (UPTD PAM) berdasarkan Perwal nomor 65 tahun 2022, untuk mempercepat pemenuhan terhadap Target capaian pelayanan air minum bagi masyarakat khususnya pada wilayah yang rawan air minum dan belum terjangkau pelayan BUMD Khusus Air Minum, sesuai dengan Ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Skema jaringan perpipaan harus ditingkatkan cakupannya, untuk memastikan mutu layanan air minum menjadi aman sesuai dengan Standar Teknis serta menjaga kualitas lingkungan dari eksploitasi penggunaan air tanah berlebihan yang akan mengakibatkan penurunan muka air tanah sehingga akan mempermudah terjadinya banjir.

Besarnya investasi untuk pembangunan sarana prasarana jaringan perpipaan air minum Kota cukup besar namun berbanding pula dengan Target Kota untuk pemenuhan capaian Pelayanan Dasar air minum kota yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat kota dirasa perlu menjadi perhatian khusus bagi pemangku kebijakan.

Pengelolaan Air Minum bagi masyarakat di Zona I (Serpong dan Serpong Utara) dan Zona II (Pondok Aren) bekerjasama memanfaatkan air curah yang dihasilkan oleh Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Karian Serpong milik Kementerian PUPR yang berlokasi di Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara sebesar 650 liter per detik untuk 52.000 SR atau sekitar 260.000 jiwa yang direncanakan beroperasi pada tahun 2025 (yang akan dilakukan penyerapan secara bertahap dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029) melalui pembentukan BUMD Khusus Air Minum berdasarkan kategori pelayanan dengan bentuk perusahaan Persero. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dimana pengelolaan air minum dilakukan terpisah dari unit usaha BUMD yang lain dan dapat menjalankan roda usaha dengan lebih mandiri dan profesional, hal ini akan berimplikasi pada peningkatan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang sebelumnya sebesar $\pm 12\%$ dari seluruh KK sehingga total akses air minum melalui jaringan perpipaan di Tangerang Selatan meningkat menjadi sebesar $\pm 25,48\%$.

Pemenuhan jaringan perpipaan di Zona 3 saat ini telah dilaksanakan oleh PT. PITS melalui kerjasama B to B dengan Tirta Tangsel Mandiri dengan jumlah sambungan saat ini mencapai 5200 SR atau sekitar 26.000 jiwa terlayani, juga terus digencarkan pemasaran dan promosinya, agar sisi keekonomisan bisnis tersebut dengan kapasitas air sebesar 200 liter per detik dapat tercapai untuk mengejar Target sambungan sebanyak 16.000 SR secepat mungkin.

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum pada indikator Air Minum sebagaimana table 2.15 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Capaian Layanan Air Minum

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	CIPUTAT	7 Kelurahan	54.923	7.689	47.234	-
2	PONDOK AREN	11 Kelurahan	74.562	10.439	64.123	-
3	PAMULANG	8 Kelurahan	91.780	12.849	78.931	-
4	SERPONG	9 Kelurahan	39.384	5.514	33.870	-
5	SETU	6 Kelurahan	22.423	3.139	19.284	-
6	SERPONG UTARA	7 Kelurahan	37.102	5.194	31.908	-
7	CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	52.374	7.332	45.042	-
Total *)			372.548	52.157	320.391	-

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pada pelaksanaan pemenuhan capaian air minum sebagaimana tabel 2.16 diatas dilaksanakan melalui data Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ciputat	Kel.Pondok Benda	Kali Angke	Air Permukaan	Kec.Pamulang	200 lit/det	50 lit/det	200 lit/det	PT. PITS
2	Pondok Aren	Kel.Jelupang	Waduk Karian	Air Permukaan	KPBU (Pemerintah Pusat) Karian Serpong	650 lit/det	650 lit/det	650 lit/det	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
3	Pamulang	Kel.Pondok Benda	Kali Angke	Air Permukaan	Kec.Pamulang	200 lit/det	50 lit/det	200 lit/det	PT. PITS
4	Serpong	Kel.Jelupang	Waduk Karian	Air Permukaan	KPBU (Pemerintah Pusat) Karian Serpong	650 lit/det	650 lit/det	650 lit/det	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
5	Setu	Kel.Sepong	Sungai Cisadane	Air Permukaan	Kec.Sepong	-	-	-	PDAM Kab.Tangerang
6	Serpong Utara	Kel.Jelupang	Waduk Karian	Air Permukaan	KPBU (Pemerintah Pusat) Karian Serpong	650 lit/det	650 lit/det	650 lit/det	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
7	Ciputat Timur	Kel.Pondok Benda	Kali Angke	Air Permukaan	Kec.Pamulang	200 lit/det	50 lit/det	200 lit/det	PT. PITS

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara umum kondisi SPAM Jaringan Perpipaan yang digunakan dalam rangka pemenuhan Target dan mutu layanan Penerapan SPM dalam kondisi beroperasi dengan kuantitas 200 lit/det dari PT.PITS dan ada yang belum beroperasi dengan kuantitas 650 lit/det dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Capaian indikator penyediaan pengelolaan air limbah dengan standar akses layak pada Kota Tangerang Selatan sudah mencapai 87,24%, dengan pelayanan capaian Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) sebesar ±87% dan sisanya dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) sebesar ±0,24% sesuai dengan penjelasan dalam Dokumen Sanitasi milik Kota Tangerang Selatan seperti Dokumen Ehra, Strategi Sanitasi kota (SSK) dan Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (RISPALD), sedangkan sisa KK yang belum tercapai memiliki permasalahan seperti lokasi tinggal yang tidak menetap tinggal di Kota Tangerang Selatan, pola pikir/prilaku/kebiasaan yang tidak mencerminkan hidup sehat seperti masih melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan lain-lain. Capaian pengelolaan air limbah dengan akses layak belum dapat dicapai seluruhnya sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 18 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Menurut Pengelolaan Air Limbah dengan Akses Layak

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		Persentase
		Indikator Kinerja	Target (KK)	Realisasi Capaian Target (KK)	
1	Air Limbah	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-S	437.357	380.501	87%
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-T	1.050	1.050	0,24%
Jumlah			438. 407	381.551	87,24%

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pemenuhan layanan air limbah domestik Kota Tangerang Selatan dilayani dengan sistem setempat (SPALD-S) dan sistem terpusat (SPALD-T). Namun baik pelayanan dengan sistem setempat dan terpusat memiliki tujuan akhir pengolahan pada IPLT Kota, yang sampai pada tahap ini yaitu pemenuhan readiness criteria (seperti dokumen RISPALD, FS, DED, DPPT, perencanaan pembentukan lembaga, retribusi serta peraturan terkait pengelolaan air limbah domestik) dalam pembangunan IPLT Kota. Selain itu Target capaian pembangunan IPLT Kota sudah tertuang pada RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 yang akan dilakukan pembangunannya yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Setu, pada tahun 2024 diharapkan akan membuat

kenaikan Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik Kota Tangerang Selatan meningkat signifikan serta menuju akses layak berkelanjutan bahkan menuju capaian pelayanan dengan akses aman. Dalam pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum pada indikator Air Limbah sebagaimana table 2.17 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Capaian Layanan Air Limbah Domestik

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI				
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CIPUTAT	7 Kelurahan	54.868	54.868	-	-	-	-	54.868	54.701	55
2	PONDOK AREN	11 Kelurahan	74.342	74.342	-	-	-	-	74.342	74.175	220
3	PAMULANG	8 Kelurahan	91.560	91.560	-	-	-	-	91.560	91.393	220
4	SERPONG	9 Kelurahan	39.054	39.054	-	-	-	-	39.054	38.887	330
5	SETU	6 Kelurahan	22.093	21.926	-	-	-	-	21.926	21.926	330
6	SERPONG UTARA	7 Kelurahan	37.102	37.102	-	-	-	-	37.102	36.935	-
7	CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	52.374	52.374	-	-	-	-	52.374	52.207	-
Total *)			371.393	371.226	-	-	-	-	371.226	370.224	1.155

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pada pelaksanaan pemenuhan capaian air limbah domestik sebagaimana tabel 2.19 diatas dilaksanakan melalui data Kondisi SPALD sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Kondisi SPALD

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
			KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
					(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	SPALD-S	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	7 Kelurahan	54.868	54.868	54.701	54.701
			PONDOK AREN	11 Kelurahan	74.342	74.342	74.175	74.175
			PAMULANG	8 Kelurahan	91.560	91.560	91.393	91.393
			SERPONG	9 Kelurahan	39.054	39.054	38.887	38.887
			SETU	6 Kelurahan	22.093	22.093	21.926	21.926
			SERPONG UTARA	7 Kelurahan	37.102	37.102	36.935	36.935
			CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	52.374	52.374	52.207	52.207
2	SPALD-T	KOTA TANGERANG SELATAN	CIPUTAT	7 Kelurahan	55	55	55	55
			PONDOK AREN	11 Kelurahan	220	220	220	220
			PAMULANG	8 Kelurahan	220	220	220	220
			SERPONG	9 Kelurahan	330	330	330	330
			SETU	6 Kelurahan	330	330	330	330
			SERPONG UTARA	7 Kelurahan	-	-	-	-
			CIPUTAT TIMUR	6 Kelurahan	-	-	-	-

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengalokasi anggaran SPM Urusan Urusan Pekerjaan Umum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. Alokasi anggaran tersebut berasal dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang selaku Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi capaian SPM terkair air minum dan air limbah domestik di Kota Tangerang Selatan. Alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Urusan Perumahan Umum adalah sebesar Rp8,435,776,921 dengan rincian anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Capaian		Presen- tase
		Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Alokasi Anggaran	
1	Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4,367,708,638	4.284.473.150	98,1%
2	Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten /Kota	4,068,068,283	3.785.709.460	93,06%
Jumlah				8,435,776,921	8,070,182,610	95,67%

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Pelaksanaan capaian Program layanan dasar pada SPM Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh ASN dan non ASN di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai berikut.

Tabel 2. 22 Personil Pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	12 Orang
2	Jabatan Fungsional	13 Orang
3.	Jabatan Pelaksana	26 Orang
3	Non ASN	130 Orang
Total		181 Orang

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Target yang telah dirumuskan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, realisasi capaian SPM Urusan Perumahan dan Permukiman tercapai 100% sesuai dengan Target yang telah ditetapkan. Adapun data realisasi sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi Capaian Target (orang)	Persentase
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	30	100%
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	3	3	100%
Jumlah			3	3	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 24 Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Capaian		
		Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi Capaian Target (orang)	Persentase
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30	30	100%
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0	0	100%
Jumlah			30	0	100%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Realisasi capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat pada indikator pemberian akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana di Targetkan 0 hal tersebut dikarenakan tidak ada korban bencana tahun 2021 yang harus diberikan layanan akses sewa layak huni pada tahun 2022. Namun demikian di Kota Tangerang Selatan telah terjadi bencana yang berdampak pada diperlukannya pemberian akses rumah sewa melalui perjanjian pemberian akses rumah sewa sebanyak 30 perjanjian rumah sewa dengan persentase mutu capaian 100%. Bantuan akses sewa rumah dilaksanakan dalam rangka memberikan fasilitas tinggal sementara bagi korban yang hunian terdampak akibat bencana. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan per perjanjian dan dapat diperpanjang hingga rumah bagi korban bencana dapat dihuni kembali.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan rehabilitasi terhadap 3 unit rumah terdampak bencana longsor pada tahun 2021 di Kelurahan Kranggan.

Adapun Program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak terlaksana dikarenakan tidak terdapat Target relokasi Program pemerintah pada tahun 2022.

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tabel 2.24 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

N O	JENIS BENCANA	TAH UN TER JAD INY A BE NCA NA	KECAMAT AN	KELURAHA N /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOT AL	RUSA K RING AN	RUSAK SEDAN G	RUSAK BERAT	REHAB ILITASI	PEMBA NGUNA N KEMBA LI	RELOK ASI	SUBSI DI UANG SEWA	REHAB ILITASI	PEMBA NGUNA N KEMBA LI	RELOK ASI	SUBSI DI UANG SEWA	BELUM TERLA YANI
					(UNI T RU MA H)	(UNIT RUM AH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kebakaran	202 2	Ciputat Timur	Rengas	4	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-
2	Kebakaran			Cempaka Putih	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
3	Kebakaran			Rempoa	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
4	Longsor		Setu	Keranggan	3	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-
5	Kebakar		Ciputat	Serua	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6	Angin dan Hujan			Jombang	2	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-
7	Angin dan Hujan		Pondok Aren	Parigi	3	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-
8	Angin dan Hujan			Pondok Jaya	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
9	Angin dan Hujan			Pondok Betung	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10	Angin dan Hujan			Pondok Karya	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
11	Angin dan Hujan		Serpong	Ciater	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Total *)					22	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan data tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bahwa Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi

Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak terdapat kriteria masyarakat atau warga yang perlu direlokasi akibat Program pemerintah.

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu layanan sebagaimana tabel 2.25 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni
Bagi Korban Bencana

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bencana Lainnya yang Disebabkan oleh Alam	2021	Ciputat	Jombang	1	0	0	1	1	0	0
2	Bencana Lainnya yang Disebabkan oleh Alam	2021	Ciputat	Jombang	1	0	0	1	1	0	0
3	Bencana Lainnya yang Disebabkan oleh Alam	2023	Ciputat	Jombang	1	0	0	1	1	0	0
4	Bencana Lainnya yang Disebabkan oleh Alam	2023	Ciputat	Jombang	1	0	0	1	1	0	0
5	Bencana Lainnya yang Disebabkan oleh Alam	2023	Setu	Muncul	1	0	0	1	1	0	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan data tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bahwa Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan, dikarenakan tidak terdapat kriteria masyarakat atau warga yang perlu direlokasi akibat Program pemerintah.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengalokasi anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebesar Rp2.486.513.300 dengan rincian anggaran sebagai berikut.

Tabel 2. 27 Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Capaian		Persentase
		Program	Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	271,991,600	241,573,600	88,82 %
		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2,214,521,700	1,994,583,200	90.07 %
Jumlah				2.486.513.300	2.236.165.800	89,44 %

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Pelaksanaan capaian Program layanan dasar pada SPM Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh ASN dan non ASN di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut.

Tabel 2. 28 Personil Pendukung SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	9 Orang
2	Jabatan Fungsional	13 Orang
3	Jabatan Pelaksana	15 Orang
4	Non ASN	106 Orang
Total		143 Orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 29 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Layanan Dasar	Indikator	Target (orang)	Realisasi Target (orang)	Persentase
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	318.499	318.499	100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	318.499	318.499	100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	74.812	74.812	100%
Jumlah			711.810	711.810	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 30 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Satuan Polisi Pamong Praja

No	Layanan Dasar	Indikator	Target (orang)	Realisasi Target (orang)	Persentase
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	35	35	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 31 Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Layanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	62	62	100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas bisa disimpulkan bahwa capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) PD tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tabel 2.31, 2.32, dan 2.33 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16 = $\bar{x}(12+13+14)$	17 = $\Sigma(15x16)$	18 = $\bar{x}(12+14)$	19 = $\Sigma(15x18)$	20
			sarana prasarana penanggulangan bencana x 100%	an bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana															
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana, Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Bulan	12	473.071.000	200	414.815.980	100%	87,69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana, Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Jiwa	318.449	441.258.600	318.449	441.258.600	100%	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Laporan	12												
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	Laporan	12												
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi, perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Jiwa	318.449	441.055.000	200	441.055.000	100%	100,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	APBD

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 33 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM
Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara, Fasum, Fasos dan
Aset Warga Negara

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
							%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah warga negara yang mendapat layanan akibat dari penegakan perda dan perkara	Orang/Unit	5 Orang	2 Unit	0	0	0	0	APBD

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 34 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
(Pemadaman dan Evakuasi)

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	KOTA TANGERANG SELATAN	90%	10%	100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 35 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi
Non Kebakaran)

N O .	KABUP ATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELA KAAN TRANSP ORTASI	WAT ER RES CUE	ANI MAL RES CUE	PENYELA MATAN PADA KETINGG IAN	PENYELA MATAN PADA BANGUN AN RUNTUH	PENAN GANAN POHON TUMBA NG	PENAN GANAN PERCO BAAN BUNUH DIRI	LAIN NYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA TANGE RANG SELATA N	7	1	200	0	0	2	0	22

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Dalam pelaksanaan pemenuhan mutu layanan sebagaimana tabel 2.34, 2.35, 2.36 dan 2.37 diatas dilaksanakan pengumpulan data sebagai berikut:

Tabel 2. 36 Daftar Ketersediaan Peralatan Pendukung Operasi Tanggap
Darurat Bencana

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH / SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT				
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANG ANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNG SIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Handy Talkie	5	√	√		√	
2	Handy Talkie (HT)	10	√	√		√	
3	HT ICOM IC-V8	4	√	√		√	
4	HT	1	√	√		√	
5	Handy Talkie	16	√	√		√	
6	Handy Talky (HT)	5	√	√			
7	VHF Repeater + Instalasi	1	√	√			
8	Antena	1	√	√			
9	Antena Repeter VHF/FM	1	√	√			
10	Radio SSB	8	√	√			

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH / SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT				
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANG ANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNG SIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Alat Komunikasi Radio VHF Unit Transceiver VHF Portable	4	√	√			
12	GPS	6	√	√			
13	Antena/Penangkal Petir	1	√	√			
14	Mobil Rescue	1	√	√		√	
15	Motor Rescue	1	√	√		√	
16	Motor Rescue	1	√	√		√	
17	Alat Berat Pengolahan Air Kotor/Unit Mobil Gandengan	1		√			
18	Mobil Dapur Lapangan	1		√			
19	Perahu Karet	3		√			
20	Perahu Karet	2		√			
21	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR KHUSUS (PERAHU KARET)	5		√			
22	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Penumpang Perahu Penumpang	1		√			
23	Perahu Karet (Paralatan Olah Raga Air)	1		√			
24	Perahu Motor Tempel	2		√			
25	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1		√			
26	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	1		√			
27	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	7		√			
28	Trolley Perahu	2		√			
29	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus Lainnya	1		√			
30	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus Lainnya	2		√			
31	Tenda Pleton	1				√	√
32	Tenda	2				√	√
33	Tenda Keluarga	1				√	√
34	Tenda Posko	1				√	√
35	Tenda Pleton	2				√	√
36	Tenda Regu	3				√	√
37	Tenda Keluarga	5				√	√
38	Tenda Pleton	1				√	√
39	Tenda	5				√	√
40	Tenda	1				√	√
41	Tenda	1				√	√
42	Tenda	2				√	√
43	Veld Bed	15				√	√
44	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lain- Lain	2				√	√
45	Mobile Pump	1	√	√			√
46	Genset	1		√			√
47	Genset SKVA	1		√			√
48	Mesin Penyedot Air	1		√			√
49	Mesin Penyedot Air	2		√			√
50	RIG Lengkap	1		√			√

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH / SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT				
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANG ANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNG SIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Gergaji Mesin	2		√			√
52	Perlengkapan alat selam	2		√			√
53	HID Searchlight	1		√			√
54	LAMPU SOROT DAN TRIPOD PORTABLE	1		√			√
55	Lampu Natrium	1		√			√
56	Alat Berat Pengolahan Air Kotor/Uji Coba Sistem Pengolahan	3					
57	Alat Berat Pengolahan Air Kotor/Unit Sistem Dosing	1					
58	Alat Berat Pengolahan Air Kotor/Genset	1					
59	Mesin Steam	2					
60	RAK PENYIMPANAN PERAHU KARET	1					
61	RAK PENYIMPANAN MAKANAN SIAP SAJI BUFFER STOCK	1					
62	LOKER PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KERJA LAPANGAN TIM REAKSI CEPAT	7					
63	Perkakas Bengkel Kayu Mesin Gergaji	1		√			
64	Perkakas Pengangkat Perkakas Pengangkat Lain-lain	1		√			
65	Peralatan Tukang-tukang Besi Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper	1		√			
66	Alat Olah Raga/Helmets	9	√	√			
67	Alat Olah Raga/Descenders	3	√	√			
68	Alat Olah Raga/Non Henadle Ascender	6	√	√			
69	Alat Olah Raga/Pulleys	3	√	√			
70	Alat Olah Raga/Rope Clamps	2	√	√			
71	Alat Olah Raga/Lanyards	2	√	√			
72	Alat Olah Raga/Auto Stop	2	√	√			
73	Alat Olah Raga/Tali Karmantel Statis	1	√	√			
74	Alat Olah Raga/Tali Karmantel Dinamis	1	√	√			
JUMLAH		200					

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 2.38 bahwa kondisi ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana semuanya dalam kondisi baik dan untuk posisi maupun institusi penanggungjawab adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2. 37 Daftar Ketersediaan Stok Logistik Pengungsian

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Susu Segar	6	Gudang	BPBD Kota Tangsel

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
2	Madu	6	Gudang	BPBD Kota Tangsel
3	You C1000	6	Gudang	BPBD Kota Tangsel
4	Kratingdang	12	Gudang	BPBD Kota Tangsel
5	Biscuit Rasa Kelapa 300 g	12	Gudang	BPBD Kota Tangsel
6	Container Serbaguna	6	Gudang	BPBD Kota Tangsel
7	Sabun mandi Detol	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
8	Handuk Bayi	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
9	Botol Susu	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
10	Selimut Bayi	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
11	Perlak Bayi	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
12	Container Serbaguna	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
13	Bedak Salicyl KF	49	Gudang	BPBD Kota Tangsel
14	Susu Formula SGM	98	Gudang	BPBD Kota Tangsel
15	Pembersih Lantai	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
16	Serokan air	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
17	Lap Chamois	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
18	Alat Kebersihan Sarung Tangan	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
19	Sikat Kamar Mandi	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
20	Alat Kebersihan Sapu	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
21	Sapu Lidi		Gudang	BPBD Kota Tangsel
22	Alat Kebersihan Plastik Sampah	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
23	Container Serbaguna	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
24	Kenebo	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
25	Alat Kebersihan Sarung Tangan	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
26	Alat Kebersihan Sapu	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
27	Sapu Lidi	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
28	Alat Kebersihan Plastik Sampah	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
29	Container Serbaguna	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
30	Lap Pel /Kain Pel	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
31	Tisu Kotak	142	Gudang	BPBD Kota Tangsel
32	Selimut Standar	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
33	Kornet Sapi	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
34	Biskuit Kelapa	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
35	Handuk Besar	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
36	Sarden	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
37	Minyak Goreng	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
38	Container Serbaguna	5	Gudang	BPBD Kota Tangsel
39	Masker Surgical (DSP)	15450	Gudang	BPBD Kota Tangsel
40	Sabun Cair (DSP)	6047	Gudang	BPBD Kota Tangsel
41	Masker Kain (DSP)	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
42	Hand Sanitizer (DSP)	812	Gudang	BPBD Kota Tangsel
43	Sabun Batang (DSP)	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
44	Perlengkapan Bayi	30	Gudang	BPBD Kota Tangsel
45	Kebersihan Keluarga	30	Gudang	BPBD Kota Tangsel
46	Kantong Jenazah	20	Gudang	BPBD Kota Tangsel
47	Paket Sembako	0	Gudang	BPBD Kota Tangsel
48	Paket Sembako	1346	Gudang	BPBD Kota Tangsel

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 2.39 bahwa kondisi ketersediaan stok logistik pengungsian semuanya dalam kondisi baik.

Tabel 2. 38 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh SATPOL PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA
1	2	3
1	MINIBUS	3
2	TRUK	3
3	PICK UP	10
4	SEPEDA MOTOR	17

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Pada tabel 2.40 dengan kondisi sarana dan prasarana adalah layak sebanyak 1 buah dari masing-masing jenis sarana dan prasarana.

Tabel 2. 39 Data Dukung Pelaksanaan SPM oleh Dinas Pemadam Kebakaran

NO.	PROVINSI KABUPATEN/ KOTA	BENTUK KELEMBAGAAN				JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	BESARAN APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN						JUMLAH PETUGAS					JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN			
		DINAS	SATPOL PP	BPBD	TIPE									MOBIL DAMKAR	MOBIL TANGKI	MOBIL TANGGA	MOBIL RESCUE	MOBIL LAINNYA	TANDON AIR/ GROUND TANK	PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	NON PNS	JABATAN/ KUALIFIKASI	RELAWAN KEBAKARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	KOTA TANGERANG SELATAN	√	-	-	B	1.378.466	164,85	25.915.778.249	14.719.384.915	12	2	1	-	2	-	24	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	252	staff administrasi, keamanan, supir, office boy dan petugas pemadaman dan penyelamatan	30	88	99	114	79

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan anggaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Adapun besarnya anggaran yang ditetapkan untuk 3 (tiga) PD sebagai berikut.

Tabel 2. 40 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.124.047.250	920.573.250	80,30%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2,252,661,022	1,943,497,550	86.28 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,470,730,000	2,326,841,980	94,18 %
Jumlah		5.847.438.272	5.172.912.780	88,46%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 41 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Satuan Polisi Pamong Praja

No	Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	635.430.000	576.448.000	95,19%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 42 Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	12.491.117.000	12.441.345.400	99,88%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 43 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.847.438.272
2	Satuan Polisi Pamong Praja	635.430.000
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.491.117.000
Jumlah		18.973.985.272

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Tangerang Selatan 2023

Personil yang mendukung realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang ada di 3 (tiga) PD, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berjumlah 790 orang. Adapun rincian personil yang mendukung Program kerja layanan dasar Urusan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 44 Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6 Orang
2	Jabatan Fungsional	8 Orang
3	Jabatan Pelaksana	11 Orang
4	Non ASN	71 Orang
Total		96 Orang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 45 Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Satuan Polisi Pamong Praja

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	16 Orang
2	Jabatan Fungsional	1 Orang
3	Jabatan Pelaksana	15 Orang
4	Non ASN	385 Orang
Total		417 Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 2. 46 Personil SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	15 Orang
2	Jabatan Fungsional	6 Orang
3	Jabatan Pelaksana	5 Orang
4	Non ASN	251 Orang
Total		277 Orang

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2.6. Urusan Sosial

Pada capaian realisasi Program Kegiatan SPM Urusan Sosial, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil merealisasikan capaiannya sesuai dengan Target, yaitu 100%. Adapun rincian realisasi capaian SPM Urusan Sosial adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 47 Realisasi SPM Urusan Sosial

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	466	466	100%
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	22	22	100%
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	26	26	100%
4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	161	161	100%
5	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.708	2.708	100%
Jumlah		3.383	3.383	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, SPM Urusan Sosial telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sosial. Terlihat bahwa persentase Target jumlah warga yang dilayani dan pelayanan yang diberikan sebesar 100%. Dalam pelaksanaan SPM Urusan Sosial sebagaimana tabel 2.48 diatas dilaksanakan melalui pemenuhan mutu layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	466	307,923,732	466	284,972,804	100	92.5	APBD
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	-	-	-	-			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	466	28,800,000	466	28,800,000	100	100.0	APBD
c	Penyediaan Permakanan	Orang	466	60,000,000	466	60,000,000	100	100.0	APBD
d	Penyediaan Sandang	Orang	466	30,000,000	466	30,000,000	100	100.0	APBD
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang	466	39,482,235	466	25,402,235	100	64.3	APBD
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang	466	51,973,897	466	51,888,297	100	99.8	APBD
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	466	45,742,400	466	40,976,400	100	89.6	APBD
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu	Orang	-	-	-	-			

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
	Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan								
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	-	-	-	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	466	33,626,400	466	29,637,272	100	88.1	APBD
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	466	18,298,800	466	18,268,600	100	99.8	APBD
m	Layanan Rujukan	Orang	-	-	-	-			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	22	115,471,399	22	106,864,801	100	92.5	APBD
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	-	-	-	-			
b	Penyediaan Permakanan	Orang	22	22,500,000	22	22,500,000	100	100.0	APBD
c	Penyediaan Sandang	Orang	22	11,250,000	22	11,250,000	100	100.0	APBD
d	Penyediaan Alat Bantu	Orang	22	14,805,838	22	9,525,838	100	64.3	APBD
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang	22	-	22	-			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang	22	19,490,211	22	19,458,111	100	99.8	APBD
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang	22	17,153,400	22	15,366,150	100	89.6	APBD
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau	Orang	-	-	-	-			

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
	Kartu Identitas Anak								
i	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang	-	-	-	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	22	12,609,900	22	11,113,977	100	88.1	APBD
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	22	6,862,050	22	6,850,725	100	99.8	APBD
l	Layanan Rujukan	Orang	-	-	-				
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang	22	3,600,000	22	3,600,000	100	100.0	APBD
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang	22	3,600,000	22	3,600,000	100	100.0	APBD
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan	Orang	22	3,600,000	22	3,600,000	100	100.0	APBD

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
	Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan								
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Orang	26	115,471,399	26	106,864,801	100	92.5	APBD
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	-	-	-				
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang	26	3600000	26	3,600,000	100	100.0	APBD
c	Penyediaan Permakanan	Orang	26	22500000	26	22,500,000	100	100.0	APBD
d	Penyediaan Sandang	Orang	26	11250000	26	11,250,000	100	100.0	APBD
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang	26	14805838.05	26	9,525,838	100	64.3	APBD
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang	26	19490211.3	26	19,458,111	100	99.8	APBD
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Orang	26	17153400	26	15,366,150	100	89.6	APBD
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	-	-	-	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang	-	-	-	-			

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	26	12609900	26	11,113,977	100	88.1	APBD
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	26	6862050	26	6,850,725	100	99.8	APBD
m	Layanan Rujukan	Orang	-	-	-	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Orang	26	3600000	26	3,600,000	100	100.0	APBD
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang	26	3600000	26	3,600,000	100	100.0	APBD
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	166	230,942,799	166	213,729,603	100	92.5	APBD
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang	-	-	-	-			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan	Orang	166	7200000	166	7,200,000	100	100.0	APBD

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
	Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti								
c	Penyediaan Permakanan	Orang	166	45000000	166	45,000,000	100	100.0	APBD
d	Penyediaan Sandang	Orang	166	22500000	166	22,500,000	100	100.0	APBD
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang	166	29611676.1	166	19,051,676	100	64.3	APBD
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang	-	-	-	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang	166	38980422.6	166	38,916,223	100	99.8	APBD
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Orang	166	34306800	166	30,732,300	100	89.6	APBD
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	-	-	-	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang	-	-	-	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang	166	25219800	166	22,227,954	100	88.1	APBD
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	166	13724100	166	13,701,450	100	99.8	APBD
m	Layanan Rujukan	Orang	-	-	-	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum	Orang	166	7200000	166	7,200,000	100	100.0	APBD

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
							FISIK	KEUANGAN	
	Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan								
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang	166	7200000	166	7,200,000	100	100.0	APBD

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

Serta sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan sebagaimana ketentuan penyediaan sarana dan prasarana pemberian layanan sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Data Dan Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial

N O	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA											
		SHEL TER/ RUM AH SING GAH	PU SK ES OS	CALL CEN TER	KENDA RAAN KHUSU S KEDAR URATAN	TRC KET ELA NT ARA N	DAP UR UMU M	LD P	MAN AJEM EN LOGI STIK	MANA JEME N SHELT ER	KE PO SK OA N	KS B	TRC BENCAN A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9
2	Jumlah total anak terlantar yang	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9

N O	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA											
		SHELTER/RUMAH SINGGAH	PU SK ES OS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRCKET ELANTARAN	DAPUR UMUM	LD P	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KS B	TRCBENCANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	memerlukan layanan di luar panti/lembaga												
3	Jumlah total lanjut usia terlanter yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9
	Total sarana prasarana yang ada												
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan												
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kot a	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9
	Total sarpras yang ada	1	1	Ya	2	9	Ya		1	0			9
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan												

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pemenuhan Target dan mutu layanan Penerapan SPM dalam kondisi baik dan pada beberapa sarana yang digunakan terdapat kerusakan sedang.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan anggaran capaian SPM Urusan Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun jumlah alokasi anggaran untuk urusan ini adalah Rp4.581.814.529 berada pada Dinas Sosial selaku PD yang melaksanakan capaian SPM. Adapun rincian anggarannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 50 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

No	Indikator Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.	597,405,429	551,043,109	92.24%

No	Indikator Layanan Dasar	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.			
3	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
4	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
5	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3,984,409,100	3,755,029,200	92.24%
Jumlah		4,581,814,529	4,306,072,309	93.98%

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya Kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 2. 51 Personil Pendukung SPM Urusan Sosial

No	Personil	Jumlah
1	Jabatan Struktural	6 Orang
2	Jabatan Fungsional	10 Orang
3	Jabatan Pelaksana	15 Orang
4	Non ASN	85 Orang
Total		116 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian Penerapan SPM di Kota Tangerang Selatan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Terhadap Bidang Pendidikan di Kota Tangerang Selatan secara garis besar mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib Pelayanan Dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya Pendidikan usia dini;
- 2) Kurangnya daya tampung SMP Negeri, disisi lain minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri sangat tinggi;
- 3) Masih terdapat tenaga pendidik yang belum tersertifikasi namun sudah memenuhi kualifikasi S1; dan

- 4) Masih kurangnya pemahaman dalam pemenuhan SPM bidang Pendidikan yang berdampak belum optimalnya perencanaan dan penganggaran SPM bidang Pendidikan.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran SPM bidang kesehatan khususnya dalam pemenuhan mutu dan logistik guna mendukung pelaksanaan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan;
- 2) Keterbatasan jumlah tenaga medis dan non medis terlatih dalam memenuhi pelaksanaan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan;
- 3) Keterbatasan terhadap obat-obatan dan non obat dari kementerian kesehatan dalam pelaksanaan penanganan penyakit menular dan tidak menular;
- 4) Masih kurangnya kerjasama dan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan; dan
- 5) Dalam menentukan Target penerima layanan terdapat perbedaan antara data proyeksi yang ditentukan oleh dinas, BPS, dan Pusdatin.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota Tangerang Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Minimnya sarana dan prasarana penyediaan air minum (SPAM) dalam menunjang pelaksanaan jaringan distribusi pembagi sampai dengan sambungan rumah dan belum tersedianya laboratorium pengujian kualitas air layak dan aman;
2. Belum tersedianya fasilitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) sehingga pemenuhan pelayanan air limbah domestik secara layak dan aman belum terpenuhi; (tidak adanya lahan)
3. Belum terintegrasinya Program, Kegiatan dan subkegiatan SPM dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai; dan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga berakibat bahaya stunting.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kota Tangerang Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum berjalan secara optimal penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program pemerintah disebabkan oleh keterbatasan lahan; dan
2. Tingginya harga lahan dalam upaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Tangerang Selatan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
2. Belum tersusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana;
3. Belum tersusunnya dokumen rencana kontijensi per-jenis bencana;
4. Pelaksanaan Program penanggulangan bencana belum terintegrasi dan terkoordinasi yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan kebencanaan;
5. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana akibat dari penambahan 2 posko kebakaran;
6. Terkendalanya regulasi yang mengatur mengenai peningkatan kapasitas pemadam;
7. Belum optimalnya SDM sesuai dengan standar kualifikasi aparatur kebakaran dan penyelamatan;
8. Keterbatasan anggaran dalam menunjang Kegiatan SPM pada bidang Trantibumlinmas;
9. Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA yang telah ditetapkan; dan

10. Masih belum terpenuhinya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. BPBD (perangkat elektronik PUSDALOPS, kendaraan operasional penanggulangan bencana, genset, perahu karet, mesin pompa air portable, jack hammer, sarana posko penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran) SATPOL (kendaraan patroli penegakan PERDA, alat perlengkapan penyelamatan) DAMKAR (alat pelindung diri lengkap kebakaran dan penyelamatan (APD), Armada pemadam kebakaran, armada penyelamatan, armada ambulance).

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Tangerang Selatan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya secara keseluruhan kebutuhan dasar permukiman, sandang dan alat bantu bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, Lanjut usia terlantar diluar panti, gelandangan dan pengemis serta penghuni rumah singgah;
2. Belum optimalnya akses ke layanan pendidikan dan kependudukan bagi pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Penerapan SPM bidang sosial;
4. Belum optimalnya pengumpulan data Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS);
5. Belum adanya kantor dinas sosial dan rumah singgah yang *representative*; dan
6. Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM dalam menangani PPKS.

BAB III
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam Program, Kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Urusan Pendidikan dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
1	Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Dasar/ Pendidikan Kesetaraan	<div>1. Optimalisasi keikutsertaan Guru dalam mengikuti Proqram Guru Penggerak dan sekolah dalam mengikuti Program Sekolah Penggerak</div> <div>2. Peningkatan Kualitas Guru melalui Kegiatan Pembinaan</div> <div>3. Dukungan untuk partisipasi dalam seminar dan lokakarya</div> <div>4. Sosialisasi literasi digital Bagi Guru</div>	<div>1. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak</div> <div>2. Program pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru</div> <div>3. Dukungan untuk partisipasi dalam seminar, lokakarya, dan kursus yang relevan dengan bidang studi dan pedagogi dengan melibatkan Guru Penggerak dan Sekolah penggerak</div>

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
		<div>5. Penilaian Kinerja guru dan kepala sekolah tahunan</div> <div>6. Pelibatan Komunitas belajar untuk diskusi pembelajaran</div> <div>7. Pelayanan Pengembangan Karir</div> <div>8. Pelibatan Guru Penggerak dalam berbagi praktik baik</div> <div>9. Menyediakan Bantuan Pendidikan Sarjana bagi GTK dan Masyarakat</div> <div>10. Pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak</div> <div>11. Pemenuhan Kebutuhan Guru</div> <div>12. menyediakan Insentif bagi Kepala Sekolah/Guru Swasta</div>	<div>4. Peningkatan literasi digital dan keterampilan teknologi informasi bagi PTK.</div> <div>5. Pengembangan Implementasi sistem pemantauan dan evaluasi Kinerja guru secara teratur</div> <div>6. Memberikan kesempatan untuk berbagi praktik baik dan pengalaman melalui komunitas belajar profesional</div> <div>7. Menyusun Perencanaan pengembangan karir yang jelas untuk membantu PTK merencanakan dan mencapai tujuan karir</div> <div>8. Meningkatkan peluang untuk pertukaran pengalaman antar guru dan mentorship</div> <div>9. Program dukungan kesejahteraan psikologis dan sosial untuk mencegah kelelahan dan burnout bagi Guru</div> <div>10. Peningkatan Bantuan Pendidikan Sarjana bagi GTK dan Masyarakat</div> <div>11. Pengangkatan Pengawas dan Kepala Sekolah dari Guru Penggerak, dan berkordinasi kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan</div> <div>12. Optimalisasi Pemenuhan guru dan melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan (Indeks Pemerataan Guru meningkat)</div> <div>13. Melakukan Uji Kompetensi Guru rutin untuk mengukur tingkat kemampuan sebagai basis data perencanaan peningkatan kompetensi</div> <div>14. menyediakan Insentif bagi Kepala Sekolah/Guru Swasta</div> <div>15. menyediakan Insentif bagi Operator dapodik dan operator operasional sekolah</div>
2	Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Dasar/ Pendidikan Kesetaraan	<div>1. Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan dasar.</div> <div>2. Pengembangan profesi tenaga pendidik</div> <div>3. Perbaikan sarana dan bahan ajar pendidikan dasar</div> <div>4. Pengembangan kapasitas komite sekolah. Pengembangan Education Management Information System (EMIS)</div> <div>5. Program pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi siswa.</div> <div>6. Pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan.</div>	<div>1. Melakukan Pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pendidikan dasar</div> <div>2. Melakukan Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik</div> <div>3. Melakukan Perbaikan Sarana Dan Prasarana SD</div> <div>4. Evaluasi Pengembangan kapasitas komite sekolah. Pengembangan Education Management Information System (EMIS)</div> <div>5. Melakukan Program pembinaan dan bimbingan untuk meningkatkan prestasi siswa.</div> <div>6. Pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan</div>

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan sub Kegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Capaian
SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Pengadaan Mebel Sekolah	unit
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Unit
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Unit
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Unit
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Didik
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Satuan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Peserta Didik
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peserta Didik
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SD)	Dokumen
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			Pembangunan Laboratorium	Ruang
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Peserta Didik
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jenis
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Siswa
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jenis
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)	Dokumen
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			Pengadaan Mebel PAUD	Paket
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Tahun
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tahun
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Sekolah
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta Didik
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta Didik
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Paket
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Lembaga
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Lembaga
			Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Orang
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku
8	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Sanggar

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, 2023

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Penerapan SPM Urusan Kesehatan dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (pelatihan ANC, Pelatihan,USG, BL dokter Umum. 2.Pemenuhan alat kesehatan pelayanan kesehatan ibu hamil, (USG) 3.Kepwal Pokja AKI dan AKB 4.Monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan ibu hamil 5.Pelaksanaan AMP (audit maternal Perinatal) dengan lintas sektor 6.Ngider sehat yg dilakukan oleh bidan untuk memantau ibu dengan resiko tinggi	1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu hamil 2.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil 3.Peningkatan peran pokja dalam penurunan AKI dan AKB 4.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 5.Peningkatan peratugas ngider dalam pemantauan ibu hamil dengan resiko tinggi
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.Orientasi dan OJT pelayanan kesehatan Ibu bersalin (drill emergency dan OJT) 2.Pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan pelayanan kesehatan ibu bersalin (set poned) 3.Kepwal Pokja AKI dan AKB 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin (pengisian ekohort dan laporan poned) 5.Pelaksanaan AMP (audit maternal perinatal) 6.Ngider sehat bidan dalam pemantauan ibu bersalin dengan resiko	1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan ibu Bersalin 2.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu Bersalin 3.Peningkatan peran pokja dalam penurunan AKI dan AKB 4.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 5.Peningkatan peratugas ngider dalam pemantauan ibu Bersalindengan resiko tinggi

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> 1.Orientasi dan OJT pelayanan kesehatan bayi baru lahir(SDIDTK, Pengisian form MTBM) 2.Pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (set poned) 3.Kepwal Pokja AKI dan AKB 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir (pengisian ekohort dan laporan poned) 5.Pelaksanaan AMP (audit maternal perinatal) 6.Ngider sehat bidan dalam pemantauan bayi dengan resiko tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir 2.peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir 3.Peningkatan peran pokja dalam penurunan AKI dan AKB 4.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 5.Peningkatan peratugas ngider dalam pemantauan bayi baru lahir dengan resiko tinggi
4	Pelayanan Kesehatan Balita	<ol style="list-style-type: none"> 1.Orientasi dan OJT pelayanan kesehatan balita (SDIDTK, Pengisian form MTBs dan PMBA) 2.Pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan pelayanan kesehatan balita (Antrpometri) 3.Kepwal Pokja AKI dan AKB 4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada balita (pengisian ekohort dan laporan poned) 5.Pelaksanaan AMP (audit maternal perinatal) 6.Ngider sehat bidan dalam pemantauan balitai dengan resiko tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan balita 2.peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan balita 3.Peningkatan peran pokja dalam penurunan AKI dan AKB 4.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 5.Peningkatan peratugas ngider dalam pemantauan balita dengan resiko tinggi
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1.Orientasi dan OJT pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar termasuk UKS (PKPR, dokcil, uks, penjarangan) 2.Pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan padausia pendidikan dasar (pengisian form penjarangan) 4.Peran bina wilayah dalam skrining dan pemantauan usia pendidikan dasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 2.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 3.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 4.Peningkatan peran bina wilayah dalam skrining dan pemantauan usia pendidikan dasar
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1.Pembinaan pelaksanaan skrining usia produktif kepada kader kesehatan, sekolah, PD dan instansi Perusahaan 2.Percepatan skrining di lingkungan sekolah, instansi perusahaan swasta dan PD bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja 3.Pemenuhan BMHP dalam pelayanan skrining usia produktif 4.Penggalangan komitmen dengan fasyankes dan jejaring dalam pelaksanaan skrining dan penemuan kasus PTM 5.Melakukan monitoring evaluasi pencapaian skrining usia produktif 6.Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan usia produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan peran kader kesehatan dalam pelayanan skrining usia produktif 2.Menigkatkan peran lintas sektor dalam pelaksanaan skrining Kesehatan 3.Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada usia produktif 4.Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan pada usia produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1.Orientasi dan OJT pelayanan kesehatan lansia (caregiver,PJP) 2.Pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan dalam pelayanan kesehatan lansia (Lansia Kit) 3.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pada lansia (pengisian ekohort) 4.peran bina wilayah dalam skrining dan pemantauan lansia 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peningkatan Peran Kader dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan lansia 2.Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan lansia 3.Peningkatan monitoring dan evaluasi baik lintas Program dan lintas sektor 4.Peningkatan peran bina wilayah dalam skrining dan pemantauan lansia

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.Melakukan sosialisasi bahaya hipertensi kepada kader kesehatan, sekolah, PD dan instansi Perusahaan 2.Pemenuhan BMHP dalam pelayanan penderita hipertensi 3.Penggalangan komitmen dengan fasyankes dan jejaring dalam pelaksanaan skrining dan penemuan kasus hipertensi 4.Melakukan monitoring evaluasi pencapaian pelayanan penderita hipertensi 5.Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan pelayanan penderita hipertensi	1.Meningkatkan peran kader kesehatan dalam pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 2.Menigkatkan peran lintas sektor dalam penemuan kasus hipertensi 3.Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada hipertensi 4.Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.Melakukan sosialisasi bahaya Diabetes Mellitus kepada kader kesehatan, sekolah, PD dan instansi Perusahaan 2.Pemenuhan BMHP dalam pelayanan penderita Diabetes melitus 3.Penggalangan komitmen dengan fasyankes dan jejaring dalam pelaksanaan skrining dan penemuan kasus diebates mellitus 4.Melakukan monitoring evaluasi pencapaian pelayanan penderita diabetes melitus 5.Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan pelayanan penderita DM	1.Meningkatkan peran kader kesehatan dalam pelayanan Kesehatan penderita Diabetes mellitus 2.Menigkatkan peran lintas sektor dalam penemuan kasus Diabetes mellitus 3.Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes mellitus 4.Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.Melakukan sosialisasi tentang penanganan kasus ODGJ pada Petugas Puskesmas dan Kader Kesehatan 2.Rapat Koordinasi dengan Lintas Sektor penanganan ODGJ 3.Penggalangan komitmen dengan fasyankes dan jejaring dalam pelaksanaan skrining dan penemuan kasus ODGJ 4.Melakukan monitoring evaluasi pencapaian pelayanan Kasus ODGJ Berat 5.Peningkatan kopetensi tenaga kesehatan dalam Penanganan Kasus ODGJ Berat	1. Meningkatkan peran kader kesehatan dalam Penemuan kasus ODGJ 2. Menigkatkan peran lintas sektor dalam penemuan kasus ODGJ 3. Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan pada kasus ODGJ 4. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan pada Kasus ODGJ
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	1.Pertemuan Lintas Sektor Program TB 2.Rapat Koordinasi Laboratorium TBC 3.Rapat Koordinasi Mitra TBC 4.Belanja Bahan-Bahan Kimia (Cartrid TCM) DAK NON FISIK	1.Meningkatkan peran lintas sektor dalam pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi 2.Meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi 3.Meningkatkan peran mitra TBC dalam pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1.Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penanggulangan HIV AIDS 2.Rapat Koordinas Penanggulangan HIV AIDS 3.Belanja Bahan Kimia (Rapid HIV) DAK NON FISIK	4.Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan tentang bahaya penularan HIV AIDS dan PIMS

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan sub Kegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, 2023

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	<div>1. Usia Sebanyak 14 responden berusia antara 21-30 tahun, 20 berusia antara 31-40 tahun, 22 berusia antara 41-50 tahun, dan 21 berusia antara 51-60 tahun.</div> <div>2. Pendidikan Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK/STM, yaitu sebanyak 54 orang. Adapun responden berpendidikan terakhir SD adalah sebanyak 3 orang, SMP sebanyak 12 orang, dan S1 sebanyak 8 orang.</div> <div>3. Pekerjaan Sebanyak 5 responden memiliki pekerjaan sebagai petani, 7 sebagai pekerja bangunan, 8 merupakan guru, 27 berwirausaha, dan 30 merupakan karyawan/pegawai.</div> <div>4. Penghasilan Sebanyak 14 keluarga memiliki penghasilan <Rp 2.000.000/bulan, 23 keluarga memiliki penghasilan Rp 2.000.000/bulan - <Rp 2.500.000/bulan, 23 keluarga memiliki penghasilan Rp 2.500.000/bulan <Rp</div>	<div>1. mengumpulkan data historis</div> <div>2. menganalisis contoh yang sudah terlaksanakan</div> <div>3. memilih dan menerapkan metode <i>forecasting</i>, dan validasi ramalan dalam tahap perencanaan</div> <div>4. Memvalidasikan dan menerapkan hasil kondisi Lapangan</div> <div>5. Menetapkan tujuan perencanaan jangka waktu tahun berikutnya</div>

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
		3.000.000/bulan, dan 17 keluarga memiliki penghasilan ≥Rp 3.000.000/bulan. 5. jumlah anggota keluarga (18 responden memiliki jumlah anggota keluarga yang akan tinggal di daerah relokasi sebanyak 1-3 orang, 33 responden memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang, 17 responden memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 5 orang, dan 9 responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang. Persentase jumlah anggota keluarga responden yang akan tinggal di daerah. 6. Sumber air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga (45 responden menggunakan sumur gali sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga, 10 responden menggunakan sumur bor, 12 responden menggunakan artesis, dan 10 responden menggunakan jasa PAM. Persentase sumber air yang digunakan oleh responden untuk keperluan rumah tangga).	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR	1. Pengelolaan air limbah domestik di Indonesia masih dihadapkan dengan cukup banyak tantangan teknis maupun non-teknis 2. Beberapa data menunjukkan masih terdapat 10,41% penduduk Indonesia yang memiliki perilaku buang air besar sembarangan dan 32,1% penduduk belum memiliki pengelolaan sanitasi yang layak 3. Terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik yang efektif dan efisien 4. Kota Tangerang Selatan memiliki kepentingan terhadap upaya peningkatan pengelolaan air limbah domestik agar tidak memberikan dampak negatif terhadap industri pariwisata	1. Upaya pengembangan pengolahan air limbah domestik rumah 2. Keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik secara holistik 3. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan untuk mencukupi suatu Daerah 4. Penelitian bertujuan untuk mengamati parameter air manakala pencemaran terisolisir

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan sub Kegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1 Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60 Liter/Detik
			4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	60 Liter/Detik
			5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	404.650 (KK) SR
			6	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			9	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			11	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			12	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			13	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Tangerang Selatan, 2023

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting*	Strategi Forecasting**
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1. Harmonisasi dengan PD penanggulangan bencana dan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) perihal regulasi Permendagri 59 Tahun 2021 2. Sosialisasi perihal teknis konstruksi bangunan ramah bencana 3. Dukungan pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan pendataan dan identifikasi rumah terdampak bencana 4. Dukungan pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban bencana	1. Pendataan Rumah Sewa sebagai alternatif hunian sementara korban bencana 2. Pendataan Program sejenis dalam bentuk CSR sebagai bentuk kerjasama pemerintah dan swasta 3. Harmonisasi Program sejenis dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi 4. Sosialisasi terhadap masyarakat bersama dengan PD penanggulangan bencana perihal kajian risiko bencana khususnya area permukiman 5. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan SPM Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Belum ada Program relokasi dari Pemerintah Daerah, warga terdampak biasanya mendapatkan ganti untung</u>	1. Pendataan potensi lahan-lahan potensial 2. Pendataan potensi konsolidasi tanah

Eksisting strategi yang sudah diupayakan untuk pencapaian SPM* *Forecast strategi kedepan dalam rentang 5 tahun*

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan sub Kegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2023

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	1. Sosialisasi Mitigasi Bencana 2. Pelatihan Penanganan Banjir 3. Media dan Informasi Kebencanaan 4. Rambu Kebencanaan 5. Rapat Koordinasi Relawan Kebencanaan Kota Tangerang Selatan 6. Peningkatan Kapasitas dan Wawasan Satgas dan TRC 7. Buku Saku dan Poster Kebencanaan	1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka Dengan Penduduk Di Daerah Rawan Bencana 2. Sosialisasi Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia 3. Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik 4. Diorama KIE 5. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pelatihan Operasional Sarana dan Prasarana Kebencanaan 2. Pelatihan Penyelamatan di Air 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Relawan 4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 6. Monitoring Daerah Rawan Bencana 7. Piket Siaga Bencana 8. Kelurahan Tangguh Bencana 9. Sekolah Siaga Bencana 10. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 11. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Pelatihan Operasional Sarana dan Prasarana Kebencanaan 2. Pelatihan Penyelamatan di Air 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Relawan 4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 6. Monitoring Daerah Rawan Bencana 7. Piket Siaga Bencana 8. Kelurahan Tangguh Bencana 9. Sekolah Siaga Bencana 10. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) 11. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 12. Pelatihan Penyelamatan di area Vertikal 13. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 14. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi 15. Penyediaan Early Warning System (EWS)

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon cepat penanggulangan bencana kurang dari 24 jam dalam setiap kejadian bencana dan peningkatan kapasitas satuan tugas penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas TRC Kota dalam penanggulangan bencana dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan penyelamatan, serta penambahan relawan penanggulangan bencana agar penanganan bencana dapat berjalan maksimal

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 3. 10 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Mitigasi dampak dan Risiko terhadap gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.	1. Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 2. Memaksimalkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. 3. Optimalisasi Sumber Daya Aparatur. 4. Peningkatan Aspek Perlindungan Masyarakat.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 3. 11 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	1. MOU/Perjanjian Kerjasama antar perbatasan dengan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI (Jakarta Selatan) 2. Kerjasama dengan pihak swasta (alam sutra dan bintaro) terkait penempatan posko 3. Peningkatan standar kapasitas aparatur pemadam1 4. Perekrutan, pembentukan dan pengukuhan REDKAR pada 7 kecamatan dan 54 kelurahan 5. Penyuluhan/sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat 6. Penerimaan kunjungan dan edukasi kepada anak-anak TK/PAUD 7. Memberikan pelatihan water rescue kepada pihak yang meminta pelatihan	1. Peningkatan dan pemenuhan sarpras baik APD dan APK sesuai standar 2. Pemenuhan jumlah anggota sesuai posko 3. Peningkatan standar kapasitas aparatur selain pemadam1 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 4. Tersedia kantor/markas komando yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang pelatihan dan perbaikan unit 5. MOU/Kerjasama dengan seluruh dinas pemadam kebakaran di wilayah perbatasan 6. MOU/Kerjasama dengan pihak swasta dalam jenis penanganan bahaya kebakaran 7. Semua pos komando tidak lagi sewa

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan sub Kegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/K ota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan 2023

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Penerapan SPM Urusan Sosial dilaksanakan dengan strategi pada masing-masing jenis layanan sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Strategi dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 2. Penyediaan Alat Bantu 3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 7. Pemberian Layanan Rujukan
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (Kegiatan Sosialisasi Bebas Stunting di 7 Kecamatan) 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Layanan Rujukan 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4. Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Pemberian Layanan Rujukan 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 6. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

No	Jenis Layanan	Strategi Eksisting	Strategi Forecasting
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza 3. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga 4. Pemberian Layanan Data dan Aduan	1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza 3. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga 4. Pemberian Layanan Data dan Aduan 5. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 6. Layanan Rujukan
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan koordinasi dengan Tagana agar perlindungan korban bencana dapat direspon dengan lebih cepat 2. Menambah jumlah penyediaan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban bencana 3. Menjaga hubungan baik dengan kelurahan, tokoh masyarakat untuk laporan kejadian bencana yang lebih cepat dan akurat.	1. Meningkatkan kemampuan Tagana dalam respon di situasi bencana dengan memberikan pelatihan 2. Pembentukan Kampung Siaga Bencana sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat berdaya dalam penanganan bencana disekitarnya 3. Menjalin hubungan baik dengan Tagana, pihak kelurahan, pihak kecamatan serta tokoh masyarakat untuk laporan kejadian bencana yang lebih cepat dan akurat.

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

Secara spesifik, strategi tersebut dilaksanakan melalui Program pelaksanaan Kegiatan dan subkegiatan dengan satuan Target sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam Pemenuhan Capaian SPM Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan, 2023

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3. 15 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pendidikan Anak Usia Dini			45.256	45.256			25.268.041.553		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	45.356				26.531.443.631		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%				100,00	100,00							100,00					
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	86,44			88,33	88,33							92,75					
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	59,49			71,20	71,20							74,76					
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				0,19	0,19							0,20					
e	Kecukupan formasi guru ASN	%		-	-	-	-					-		0,50					
f	Indeks Distribusi Guru	%		-	-	-	-					-		0,50					
g	Proporsi PTK bersertifikat	%	24,22			17,29	17,29							18,15					
h	Proporsi PTK penggerak	%		-	-	-	-					-		-					
i	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-							0,30					
2	Pendidikan Dasar			210.740	210.740			777.207.049.060		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	210.940				784.979.119.549		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD			140.441	140.441			530.677.309.073				140.541				535.984.082.163		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%	104,97			100,00	101,51							100,00					
b	Angka partisipasi sekolah	%	99,05			99,72	99,72							100,00					
c	Angka partisipasi murni	%	97,15			95,48	95,48							100,00					
d	Kemampuan literasi	Nilai	64,39			71,07	71,07							74,62					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	38,61			54,30	54,30							57,02					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,58			3,17	3,17							3,33					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,74			1,11	1,11							1,17					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,89			71,15	71,15							74,71					
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60,05			70,03	70,03							73,53					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	80,98			50	50							52,50					
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,82			0,71	0,71							0,75					
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,71			85,6	85,6							86,10					
m	Proporsi PTK penggerak	%				0,02	0,02												
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-							0,30					
	SMP			70.299	70.299			246.529.739.987		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	70.399				248.995.037.386		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%	98,84			100,00	103,12							100,00					
b	Angka partisipasi sekolah	%	98,27			98,26	98,26							100,00					
c	Angka partisipasi murni	%	74,07			81,31	81,31							85,38					
d	Kemampuan literasi	Nilai	82,3			87,08	87,08							91,43					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	53,41			65,77	65,77							69,06					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,99			5,76	5,76							6,05					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,12			0,63	0,63							0,66					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,26			71,93	71,93							75,53					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	61,7			69,46	69,46							72,93					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-							25,00					
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,53			0,33	0,33							0,35					
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	61,67			89,7	89,7							94,19					
m	Proporsi PTK penggerak	%				0,16	0,16							0,17					
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-							0,30					
3	Pendidikan Kesetaraan			7.577	7.577			9.848.233.929		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	7.677				9.946.716.268		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%				-	-												
b	Angka partisipasi sekolah	%				17,44	17,44							17,50					
c	Angka partisipasi murni	%				-	-							-					
d	Kemampuan literasi	Nilai	56,3			63,87	63,87							67,06					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	51,02			67,83	67,83							71,22					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	11,23			0,09	0,09							1,00					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,76			2,88	2,88							3,02					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,26			71,24	71,24							74,80					
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60,79			69,8	69,8							73,29					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-												
k	Indeks Distribusi Guru	%				-	-												
l	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-												
m	Proporsi PTK penggerak	%				-	-												
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-												

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1	Pendidikan Anak Usia Dini			45.456				27.858.015.812		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	45.556				29.250.916.603		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%				100,00								100,00					
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	86,44			88,33								88,33					
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1 / DIV	%	59,49			71,20								71,20					
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				0,19								0,19					
e	Kecukupan formasi guru ASN	%		-		0,52						-		0,55					
f	Indeks Distribusi Guru	%		-		0,52						-		0,55					
g	Proporsi PTK bersertifikat	%	24,22			18,25								18,29					
h	Proporsi PTK penggerak	%		-		-		-				-		-					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
i	Pengalaman pelatihan guru	%				0,32		-						0,36					
2	Pendidikan Dasar			211.140				792.828.910.743		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	211.540				800.757.199.849			
	SD			140.641				541.343.922.984				140.841				546.757.362.213		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%	104,97			100,00								100,00					
b	Angka partisipasi sekolah	%	99,05			100,00								100,00					
c	Angka partisipasi murni	%	97,15			100,00								100,00					
d	Kemampuan literasi	Nilai	64,39			78,35								82,27					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	38,61			59,87								62,86					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,58			3,49								3,67					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,74			1,22								1,28					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	71,89			78,44								82,37					
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60,05			77,21								81,07					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%	80,98			55,13								57,88					
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,82			0,78								0,82					
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	30,71			87,50								89,50					
m	Proporsi PTK penggerak	%				0,02								0,04					
n	Pengalaman pelatihan guru	%				0,33								0,36					
	SMP			70.499				251.484.987.759				70.699				253.999.837.636		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%	98,84			100,00								100,00					
b	Angka partisipasi sekolah	%	98,27			100,00								100,00					
c	Angka partisipasi murni	%	74,07			89,64								94,13					
d	Kemampuan literasi	Nilai	82,3			96,01								100,00					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	53,41			72,51								76,14					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,99			6,35								6,67					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0,12			0,69								0,73					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	80,26			79,30								83,27					
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	61,7			76,58								80,41					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				25,00								25,00					
k	Indeks Distribusi Guru	%	0,53			0,36								0,38					
l	Proporsi PTK bersertifikat	%	61,67			98,89								100,00					
m	Proporsi PTK penggerak	%				0,18								0,19					
n	Pengalaman pelatihan guru	%				0,33								0,36					
3	Pendidikan Kesetaraan			7.692				10.857.677.907		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	7.712				11.400.561.802		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%																	
b	Angka partisipasi sekolah	%				17,56								17,62					
c	Angka partisipasi murni	%				-								-					
d	Kemampuan literasi	Nilai	56,3			70,42								73,94					
e	Kemampuan numerasi	Nilai	51,02			74,78								78,52					
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	11,23			2,00								3,00					
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,76			3,18								4,00					
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	76,26			78,54								82,47					
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	60,79			76,95								80,80					
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-								-					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
k	Indeks Distribusi Guru	%				-								-					
l	Proporsi PTK bersertifikat	%				-								-					
m	Proporsi PTK penggerak	%				-								-					
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-								-					

Tabel 3. 16 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Kesehatan Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	23.092	30.388	30.388			2.373.820.340		APBD/APBN	Dinkes	30.636				2.427.676.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang	23.092			30.388		12.155.200						30.636		15.318.000			
b	Tablet tambah darah	Orang	23.092			30.388		574.333.200						2.757.240		582.084.000			
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	23.092			30.388		759.700.000						30.636		765.900.000			
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Orang	23.092			30.388		8.452.500						30.636		8.750.000			
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Orang	23.092			30.388		12.425.000						30.636		14.000.000			
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Orang	23.092			30.388		34.338.440						30.636		45.954.000			
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Orang	23.092			30.388		212.716.000						30.636		229.770.000			
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	23.092			30.388		759.700.000						30.636		765.900.000			
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	1.145			1.145		-						1.145					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053		-						1.053					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.285			1.323		-						1.323					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	21.331	29.006	29.006			29.006.000		APBD/APBN	Dinkes	29.244				43.866.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Orang	21.331			29.006		29.006.000						29.244		43.866.000			
b	Kartu ibu (rekam medis)	Orang	21.331			29.006		29.006.000						29.244		-			
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	21.331			29.006		-						29.244		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	1.145			1.145		-						1.145					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053		-						1.053					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	20.315	27.625	27.625			1.102.101.375		APBD/APBN	Dinkes	27.851				1.336.853.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Orang	20.315			27.625		825.849.375						27.851		835.530.000			
b	Vitamin K1 injeksi	Orang	10.158			13.813		276.252.000						13.926		348.140.000			
c	Salap/tetes mata antibiotik	Orang	2.032			2.763		55.252.000						2.785		69.630.000			
d	Formulir bayi baru lahir	Orang	20.315			27.625		27.625.000						27.851		41.776.500			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	20.315			27.625		27.625.000						27.851		41.776.500			
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	20.315			27.625		-						27.851		-			
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	1.161			1.161		-						1.161					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053		-						1.053					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	orang	133.703	134.443	134.443			14.018.870.795		APBD	Dinkes	135.301				15.634.052.560		APBD/APBN	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang	133.703			134.443		4.974.391.000						135.301		5.412.040.000			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Orang	133.703			134.443		268.886.000						135.301		338.252.500			
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	133.703			134.443		2.633.450.000						135.301		2.616.625.000			
d	Vitamin A Biru	Orang	133.703			134.443		26.888.600						135.301		40.590.300			
e	Vitamin A Merah	Orang	133.703			134.443		26.888.600						135.301		40.590.300			
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	133.703			134.443		26.888.600						135.301		40.590.300			
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	33.426			33.611		50.416.275						33.825		54.120.560			
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	22.284			22.407		100.831.500						22.550		101.476.200			
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	33.426			33.939		1.567.986.420						33.825		1.623.616.800			
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	33.426			33.939		916.355.700						33.825		947.109.800			
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	33.426					1.764.833.200						33.825		1.860.394.250			
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang	33.426			33.939		-						33.825		-			
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Orang	33.426			33.939		916.355.700						33.825		947.109.800			
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	33.426					1.764.833.200						33.825		1.860.394.250			
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang	33.426					-						33.825		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	133.703			134.443		268.886.000						135.301		338.252.500			
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	133.703			134.443		1.344.430.000						135.301		2.029.515.000			
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053		-						1.053					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	5.440			5.440		-						3.290					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	2.129			2.129		-						2.129					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	orang	229.219	227.762	227.762			12.982.434.000		APBD	Dinkes	229.388				14.795.526.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku raport kesehatan	Orang	229.219			227.762		6.149.574.000						229.388		6.881.640.000			
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	229.219			227.762		6.149.574.000						229.388		6.881.640.000			
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	229.219			227.762		227.762.000						229.388		344.082.000			
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	229.219			227.762		227.762.000						229.388		344.082.000			
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	229.219			227.762		227.762.000						229.388		344.082.000			
f	Tenaga kesehatan : Dokter / Dokter gigi	Orang	1.417			1.417		-						1.417					
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	182			182		-						182					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	5.440			5.440		-						5.440					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	7.592			7.592		-						7.592					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	913.251	#####	#####			16.350.146.159		APBD/APBN	Dinkes	#####				17.442.114.040		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			104		6.760.000		APBD/APBN	Dinkes			118		8.850.000		APBD/APBN	Dinkes
b	Alat ukur berat badan	Unit	35			104		619.153.600		APBD/APBN	Dinkes			118		708.000.000		APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	35			104		131.797.120		APBD/APBN	Dinkes			118		153.400.000		APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Alat ukur lingk. perut	Unit	35			104		4.160.000		APBD/APBN	Dinkes			118		5.310.000		APBD/APBN	Dinkes
e	Alat : Tensimeter	Unit	35			104		177.954.400		APBD/APBN	Dinkes			118		236.000.000		APBD/APBN	Dinkes
f	Alat : Glukometer	Unit	35			104		104.000.000		APBD/APBN	Dinkes			118		141.600.000		APBD/APBN	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g	Alat : Tes strip gula darah	orang	913.251			1.257.488		11.695.770.139		APBD / APBN	Dinkes			26.407		12.675.479.040		APBD / APBN	Dinkes
h	Alat : Lancet	orang	913.251			1.257.488		2.301.678.500		APBD / APBN	Dinkes			6.602		2.420.600.000		APBD / APBN	Dinkes
i	Alat : Kapas alkohol	orang	913.251			1.257.488		581.626.000		APBD / APBN	Dinkes			13.204		622.485.000		APBD / APBN	Dinkes
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	29			35		350.000.000		APBD / APBN	Dinkes			-		-		APBD / APBN	Dinkes
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	913.251			#####		377.246.400		APBD / APBN	Dinkes			1.320.362		470.390.000		APBD / APBN	Dinkes
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957		-			
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039		-			
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144		-			
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu :Kader	Orang	5.440			5.440		-						5.440		-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	150.639	161.102	161.102			3.741.941.400		APBD	Dinkes	171.891				4.903.268.500		APBD / APBN	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	150.639			161.102		515.526.400						171.891		601.618.500			
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang	150.639			161.102		4.375.000						171.891		4.375.000			
c	Buku kesehatan lansia	Orang	150.639			161.102		3.222.040.000						171.891		4.297.275.000			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323					
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144					
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182		-						182					
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	5.440			5.440		-						1.611					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	282.924	390.112	390.112			557.523.200		APBD	Dinkes	409.618				613.275.520	-	APBD / APBN	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			104		6.760.000		APBD	Dinkes			104		7.436.000			
b	Tensimeter	Unit	35			104		433.763.200		APBD	Dinkes			104		477.139.520			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	282.924			282.924		117.000.000		APBD	Dinkes			409.618		128.700.000			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957		-			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039		-			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	38.066	52.488	52.488			716.053.819		APBD	Dinkes	55.112				787.439.201	-	APBD/APBN	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	35			104		104.000.000		APBD	Dinkes			114		114.400.000		APBD/APBN	Dinkes
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	761			1.050		488.185.639		APBD	Dinkes			1.155		537.004.203		APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	381			525		15.746.400		APBD	Dinkes			577		17.321.040		APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Lancet	Unit	190			262		85.161.780		APBD	Dinkes			289		93.677.958		APBD/APBN	Dinkes
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	38.066			52.488		16.200.000		APBD	Dinkes			55.112		17.600.000		APBD/APBN	Dinkes
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			104		6.760.000		APBD	Dinkes			114		7.436.000		APBD/APBN	Dinkes
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957		-			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039		-			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144		-			
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	orang	1.761	2.352	2.352			272.925.100		APBD	Dinkes	2.470				29.277.640		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	35			35		2.275.000						35		2.275.000			
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	1.761			2.352		245.000.000						2.352		-			
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	1.761			2.352		705.600						2.352		752.640			
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	35			35		24.944.500						35		26.250.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	35			35		-						35		-			
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	35			35		-						35		-			
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	35			35		-						35		-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	31.261	32.000	32.000			22.537.440.000		APBD/APBN	DINKES	26.220				18.466.614.900		APBD/APBN	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	35			35		-						35		-			
b	Reagen Zn TB	Orang	31.261			32.000		11.392.000.000						26.220		9.334.320.000			
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	31.261			32.000		1.344.000.000						26.220		1.101.240.000			
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	31.261			32.000		1.651.200.000						26.220		1.352.952.000			
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	31.261			32.000		8.150.240.000						26.220		6.678.102.900			
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	31.261			32.000		-						26.220		-			
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	35			35		-						35		-			
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	151			151		-						151		-			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	363			363		-						363		-			
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	31			31		-						31		-			
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	35			35		-						35		-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	orang	33.472	36.339	36.339			1.416.326.500		APBD	Dinkes	37.104				1.447.146.500	-	APBD/APBN	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	35			35		24.944.500						35		24.944.500			
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	33.472			36.339		835.797.000						37.104		853.392.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Orang	33.472			36.339		545.085.000						37.104		556.560.000			
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Orang	33.472			36.339		10.500.000						37.104		12.250.000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	1.125			1.125		-						1.125		-			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	40			40		-						40		-			
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40			40		-						40		-			
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	35			35		-						35		-			
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	35			35		-						35		-			
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	35			35		-						35		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	23.092	30.880				2.805.450.000		APBD/APBN	Dinkes	33.968				3.681.310.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang	23.092			30.880		30.880.000						33.968		50.952.000			
b	Tablet tambah darah	Orang	23.092			2.779.200		617.600.000						3.057.120		849.200.000			
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	23.092			30.880		926.400.000						33.968		1.188.880.000			
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Orang	23.092			30.880		10.500.000						33.968		12.250.000			
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Orang	23.092			30.880		15.750.000						33.968		17.500.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Orang	23.092			30.880		61.760.000						33.968		84.920.000			
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Orang	23.092			30.880		247.040.000						33.968		339.680.000			
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	23.092			30.880		926.400.000						33.968		1.188.880.000			
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	1.145			1.145								1.145					
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053								1.053					
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.285			1.323								1.323					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	orang	21.331	29.477				58.954.000		APBD/APBN	Dinkes	32.358				80.895.000		APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Orang	21.331			29.477		58.954.000						32.358		80.895.000			
b	Kartu ibu (rekam medis)	Orang	21.331			29.477								32.358		-			
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	21.331			29.477								32.358		-			
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	1.145			1.145								1.145					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053								1.053					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	orang	20.315	28.073				1.600.164.000		APBD/APBN	Dinkes	30.880				2.038.083.500		APBD	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Orang	20.315			28.073		982.555.000						30.880		1.235.200.000			
b	Vitamin K1 injeksi	Orang	10.158			14.037		421.095.000						15.440		540.400.000			
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2.032			2.807		84.222.000						3.088		108.083.500			
d	Formulir bayi baru lahir	Orang	20.315			28.073		56.146.000						30.880		77.200.000			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	20.315			28.073		56.146.000						30.880		77.200.000			
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	20.315			28.073								30.880		-			
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	1.161			1.161								1.161					
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053								1.053					
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
4	Pelayanan Kesehatan Balita	orang	133.703	136.277				17.420.766.867		APBD/APBN	Dinkes	149.904				21.692.384.550		APBD	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang	133.703			136.277		6.132.465.000						149.904		7.495.200.000			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Orang	133.703			136.277		408.831.000						149.904		524.664.000			
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang	133.703			136.277		3.041.910.000						149.904		4.057.760.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
d	Vitamin A Biru	Orang	133.703			27.407		13.703.500						27.601		27.601.000			
e	Vitamin A Merah	Orang	133.703			108.870		54.435.000						122.303		122.303.000			
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang	133.703			136.277		68.138.500						149.904		149.904.000			
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang	33.426			34.069		68.138.700						37.476		93.690.250			
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	22.284			22.713		113.564.667						24.984		199.872.800			
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang	33.426			34.069		1.703.467.500						37.476		2.061.185.500			
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang	33.426			34.069		1.022.080.500						37.476		1.311.663.500			
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang	33.426			34.069		2.044.161.000						37.476		2.435.946.500			
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang	33.426					-								-			
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	Orang	33.426			34.069		1.022.080.500						37.476		1.311.663.500			
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang	33.426			34.069		2.044.161.000						37.476		2.435.946.500			
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang	33.426					-								-			
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang	133.703			136.277		408.831.000						149.904		524.664.000			
q	Peralatan Anafilaktik	Orang	133.703			136.277		2.316.709.000						149.904		2.998.080.000			
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957								957					
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.053			1.053								1.053					
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144								144					
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	5.440			3.290								3.290					
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	2.129			2.129								2.129					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	orang	229.219	230.732				14.882.214.000		APBD/APBN	Dinkes	253.165				19.240.540.000		APBD	Dinkes
a	Buku raport kesehatan	Orang	229.219			230.732		6.921.960.000						253.165		8.860.775.000			
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang	229.219			230.732		6.921.960.000						253.165		8.860.775.000			
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang	229.219			230.732		346.098.000						253.165		506.330.000			
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang	229.219			230.732		346.098.000						253.165		506.330.000			
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang	229.219			230.732		346.098.000						253.165		506.330.000			
f	Tenaga kesehatan : Dokter/ Dokter gigi	Orang	1.417			1.417								1.417					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039								1.039					
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144								144					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	182			182								182					
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	5.440			5.440								5.440					
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	7.592			7.592								7.592					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	orang	913.251	1.386.381				18.359.895.000		APBD/APBN	Dinkes	1.455.699				19.675.650.000		APBD	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			130		19.500.000		APBD/APBN	Dinkes			130		19.500.000		APBD	Dinkes
b	Alat ukur berat badan	Unit	35			130		793.000.000		APBD/APBN	Dinkes			130		793.000.000		APBD	Dinkes
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	35			130		26.000.000		APBD/APBN	Dinkes			130		26.000.000		APBD	Dinkes
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	35			130		6.500.000		APBD/APBN	Dinkes			130		6.500.000		APBD	Dinkes
e	Alat : Tensimeter	Unit	35			130		273.000.000		APBD/APBN	Dinkes			130		273.000.000		APBD	Dinkes
f	Alat : Glukometer	Unit	35			130		158.600.000		APBD/APBN	Dinkes			130		158.600.000		APBD	Dinkes
g	Alat : Tes strip gula darah	orang	913.251			27.728		13.971.000.000		APBD/APBN	Dinkes			29.114		14.556.990.000		APBD	Dinkes
h	Alat : Lancet	orang	913.251			6.932		2.445.100.000		APBD/APBN	Dinkes			7.278		2.689.400.000		APBD	Dinkes
i	Alat : Kapas alkohol	orang	913.251			13.864		628.695.000		APBD/APBN	Dinkes			14.557		691.560.000		APBD	Dinkes
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit	29			35		38.500.000		APBD/APBN	Dinkes			-		-			
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	913.251			1.386.381		277.276.104.000		APBD/APBN	Dinkes			1.455.699		461.100.000		APBD	Dinkes
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957								957					
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039								1.039					
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144								144					
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182								182					
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu :Kader	Orang	5.440			5.440								5.440					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	orang	150.639	183.012				5.220.217.000		APBD/APBN	Dinkes	201.313				6.849.192.000		APBD	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang	150.639			183.012		640.542.000						201.313		805.252.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang	150.639			183.012		4.375.000						201.313		4.550.000			
c	Buku kesehatan lansia	Orang	150.639			183.012		4.575.300.000						201.313		6.039.390.000			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957								957					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039								1.039					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144								144					
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182								182					
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	5.440			1.611								1.611					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	orang	282.924	430.098				674.603.072		APBD/APBN	Dinkes	451.603				742.063.379		APBD	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			104		8.179.600						104		8.997.560			
b	Tensimeter	Unit	35			104		524.853.472						104		577.338.819			
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	282.924			450.580		141.570.000						495.638		155.727.000			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957								957					
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039								1.039					
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323								1.323					
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182								182					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	orang	38.066	57.868				866.543.121		APBD/APBN	Dinkes	60.761				952.855.433		APBD	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit	35			126		125.840.000		APBD/APBN	Dinkes			138		138.424.000		APBD	Dinkes
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	761			1.270		590.704.623		APBD/APBN	Dinkes			1.397		649.775.086		APBD	Dinkes
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit	381			635		19.053.144		APBD/APBN	Dinkes			699		20.958.458		APBD	Dinkes
d	Alat : Lancet	Unit	190			318		103.045.754		APBD/APBN	Dinkes			349		113.350.329		APBD	Dinkes
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	38.066			57.868		19.720.000		APBD/APBN	Dinkes			60.761		21.350.000		APBD	Dinkes

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	35			126		8.179.600		APBD/APBN	Dinkes			138		8.997.560		APBD	Dinkes
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	957			957		-						957		-			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	1.039			1.039		-						1.039		-			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	144			144		-						144		-			
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	orang	1.761	2.593				292.430.404		APBD/APBN	Dinkes	2.723				31.663.444		APBD	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	35			35		2.502.500						35		2.752.750			
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang	1.761			2.593		262.500.000						2.846		-			
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	1.761			2.593		827.904						2.846		910.694			
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	35			35		26.600.000						35		28.000.000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	35			35		-						35		-			
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	35			35		-						35		-			
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	35			35		-						35		-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	orang	31.261	27.531				19.389.945.645		APBD/APBN	DINKES	28.908				20.359.759.860		APBD/APBN	DINKES
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	35			35		-						35		-			
b	Reagen Zn TB	Orang	31.261			27.531		9.801.036.000						28.908		10.291.248.000			
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang	31.261			27.531		1.156.302.000						28.908		1.214.136.000			
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang	31.261			27.531		1.420.599.600						28.908		1.491.652.800			
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang	31.261			27.531		7.012.008.045						28.908		7.362.723.060			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	31.261			27.531		-						28.908		-			
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman	35			35		-						35		-			
h	Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis paru	Orang	151			151		-						151		-			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1.323			1.323		-						1.323		-			
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	363			363		-						363		-			
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	31			31		-						31		-			
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	182			182		-						182		-			
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	35			35		-						35		-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	orang	33.472	38.659				1.507.986.500		APBD/APBN	Dinkes	39.010				1.523.074.500		APBD	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	35			35		24.944.500						35		24.944.500			
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang	33.472			38.659		889.157.000						39.010		897.230.000			
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Orang	33.472			38.659		579.885.000						39.010		585.150.000			
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP /NIK	Orang	33.472			38.659		14.000.000						39.010		15.750.000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter / dokter spesialis penyakit dalam / dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	1.125			1.125		-						1.125		-			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	40			40		-						40		-			
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	40			40		-						40		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	35			35		-						35		-			
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	35			35		-						35		-			
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	35			35		-						35		-			

Tabel 3. 17 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	ORANG	438.407	3.625	1.885			16.222.474.379		APBD	DCKTR	3.675				18.500.000.000		APBD	DCKTR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	11			435	435	4.674.376.600		APBD	DCKTR			798		5.000.000.000		APBD	DCKTR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	11			435	435	-		APBD	DCKTR			798		500.000.000		APBD	DCKTR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	2.531			1.450	1.450	4.720.000.000		APBD	DCKTR			544		13.000.000.000		APBD	DCKTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	Rumah Tangga	2.531			1.450	1.450	-		APBD	DCKTR			544				APBD	DCKTR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		438.407	3.625	2.450			41.977.498.289		APBD	DCKTR	3.675				163.800.000.000		APBD	DCKTR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	380.501			1.700	1.400	106.269.080		APBD	DCKTR			556		5.000.000.000		APBD	DCKTR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	380.501	1.700	1.400	1.700	1.400	-		APBD	DCKTR			556		1.150.000.000		APBD	DCKTR
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	437.357			1.700	1.400	33.117.622.400		APBD	DCKTR			556		5.000.000.000		APBD	DCKTR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	106.269.080		APBD	DCKTR			644	644	1.500.000.000		APBD	DCKTR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.441.676.439		APBD	DCKTR			644	644	150.000.000.000		APBD	DCKTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1.1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	ORANG	438.407	3.675				91.998.436.405		APBD	DCKTR	3.675				82.640.080.464		APBD	DCKTR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	11			798		6.000.000.000		APBD	DCKTR			798		7.000.000.000		APBD	DCKTR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR	11			798		600.000.000		APBD	DCKTR			798		700.000.000		APBD	DCKTR
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	2.531			544		63.000.000.000		APBD	DCKTR			544		50.000.000.000		APBD	DCKTR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	2.531			544		22.398.436.405		APBD	DCKTR			544		24.940.080.464		APBD	DCKTR
2.2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR		438.407	3.675				92.200.000.000		APBD	DCKTR	3.675				44.700.000.000		APBD	DCKTR
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	380.501			556		5.500.000.000		APBD	DCKTR			556		6.000.000.000		APBD	DCKTR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	380.501			556		1.300.000.000		APBD	DCKTR			556		1.500.000.000		APBD	DCKTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	437.357			556		5.500.000.000		APBD	DCKTR			556		6.000.000.000		APBD	DCKTR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	1.050			644	644	3.600.000.000		APBD	DCKTR			644	644	4.700.000.000		APBD	DCKTR
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	1.050			644	644	75.000.000.000		APBD	DCKTR			644	644	25.000.000.000		APBD	DCKTR

Tabel 3. 18 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		3	7	7			497.000.000		APBD	DISPERKIMTA	5				355.000.000		APBD	DISPERKIMTA
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-						0		-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1			0	0	-						0		-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2			7	7	497.000.000		APBD	DISPERKIMTA			5		355.000.000		APBD	DISPERKIMTA
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0	0	-						0		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0			-				0				-			
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0	0	-						0		-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0	0	-						0		-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0	0	-						0		-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		3	5				355.000.000		APBD	DISPERKIMTA	5				355.000.000		APBD	DISPERKIMTA
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0		-						0		-			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	1			0		-						0		-			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2			5		355.000.000		APBD	DISPERKIMTA			5		355.000.000		APBD	DISPERKIMTA
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			0		-						0		-			
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0				-				0				-			
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			0		-						0		-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah	0			0		-						0		-			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			0		-						0		-			

Tabel 3. 19 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	100 %	132.000	132.000			789.692.000	-	APBD	SATPOL PP	132.000				1.000.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	0			1	1	400.000.000	-	APBD	SATPOL PP			5		2.250.000.000	-	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	10			10	10	45.000.000	-	APBD	SATPOL PP			10		50.000.000	-	APBD	SATPOL PP
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	50			150	150	289.975.000	-	APBD	SATPOL PP			200		350.000.000	-	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0			1	1	35.000.000	-	APBD	SATPOL PP			1		45.000.000	-	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			5	5	19.717.000	-	ABPD	SATPOL PP			5		25.000.000	-	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			-	-	-	-	APBD	SATPOL PP			5		25.000.000	-	APBD	SATPOL PP

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		122.769	24.600	24.600			596.191.700		APBD	BPBD	30.000	30.000			742.000.000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1	-		APBD	BPBD			1		50.000.000			
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	122.769			24.600	24.600	145.000.000		APBD	BPBD			30.000		155.000.000		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	122.769			24.600	24.600	316.241.700		APBD	BPBD			30.000		400.000.000		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	234			50	50	134.950.000		APBD	BPBD			54		137.000.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		540	220	220			159.001.800		APBD	BPBD	210	210			150.000.000		APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	132			1	1	25.000.000		APBD	BPBD			1		25.000.000		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	540,00			220	220	134.001.800		APBD	BPBD			210		125.000.000		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		74812	24.600	24.600			547.620.000	-	APBD	BPBD	30.000	30.000			720.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			2	2	43.290.000		APBD	BPBD			2		80.000.000		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	74.812			24.600	24.600	100.000.000		APBD	BPBD			30.000		160.000.000		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	6			6	6	150.000.000		APBD	BPBD			6		150.000.000		APBD	BPBD
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil	layanan	0			1	1	25.000.000		APBD	BPBD			1		30.000.000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	penetapan status KLB kurang dari 24 jam)																		
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	300			130	130	229.330.000		APBD	BPBD			130		300.000.000		APBD	BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		69	85	85			13.516.391.875				70				12.495.100.060			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran /redkar)	layanan	69			85	85	9.059.990.000		APBD	DAMKAR			70		7.803.110.060		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	20			19	19	-		APBD	DAMKAR			-		-		APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	11			13	13	1.000.000.000		APBD	DAMKAR			235		1.891.990.000		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparaturnya SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam 1)	orang	309			1.500	1.500	2.456.401.875		APBD	DAMKAR			1.000		1.800.000.000		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	69			85	85	500.000.000		APBD	DAMKAR			85		500.000.000		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	69			85	85	500.000.000		APBD	DAMKAR			85		500.000.000		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan Ketentraman dan Keteraturan Umum (TRANTIBUM)	orang	100 %	132.000				1.200.000.000	-	APBD	SATPOL PP	132.000				1.500.000.000	-	APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	0			5		2.500.000.000	-	APBD	SATPOL PP			5		2.265.000.000	-	APBD	SATPOL PP
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	10			10		60.000.000	-	APBD	SATPOL PP			10		70.000.000	-	APBD	SATPOL PP
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	50			250		450.000.000	-	APBD	SATPOL PP			300		550.000.000	-	APBD	SATPOL PP
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0			1		55.000.000	-	APBD	SATPOL PP			1		65.000.000	-	APBD	SATPOL PP
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			5		35.000.000	-	APBD	SATPOL PP			5		45.000.000	-	APBD	SATPOL PP
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			5		35.000.000	-	APBD	SATPOL PP			5		45.000.000	-	APBD	SATPOL PP
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		122.769	25.000	25.000			946.000.000	-	APBD	BPBD	24.000	24.000			627.000.000		APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1		300.000.000		APBD	BPBD					-		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	122.769			25.000		150.000.000		APBD	BPBD			24.000		150.000.000		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	122.769			25.000		400.000.000		APBD	BPBD			24.000		400.000.000		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	234			50		96.000.000		APBD	BPBD			40		77.000.000		APBD	BPBD
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		540	310	310			1.385.000.000	-	APBD	BPBD	300	300			575.000.000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit	132			2		1.225.000.000		APBD	BPBD			1		400.000.000		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	540,00			310		160.000.000		APBD	BPBD			300		175.000.000		APBD	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		74812	25.000	25.000			800.000.000	-	APBD	BPBD	24.000	24.000			850.000.000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			2		100.000.000		APBD	BPBD			2		120.000.000		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	74.812			25.000		150.000.000		APBD	BPBD			24.000		150.000.000		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	6			6		150.000.000		APBD	BPBD			6		150.000.000		APBD	BPBD
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0			1		50.000.000		APBD	BPBD			1		50.000.000		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	300			130		350.000.000		APBD	BPBD			130		380.000.000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		69	75				39.587.350.000				80				15.850.350.000			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	69			75		11.750.350.000		APBD	DAMKAR			80		11.750.350.000		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	20			-		-		APBD	DAMKAR			19		-		APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	11			253		25.037.000.000		APBD	DAMKAR			20		2.000.000.000		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	309			1.000		1.800.000.000		APBD	DAMKAR			466		1.100.000.000		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	69			85		500.000.000		APBD	DAMKAR			85		500.000.000		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	69			85		500.000.000		APBD	DAMKAR			85		500.000.000		APBD	DAMKAR

Tabel 3. 20 Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Urusan Sosial Kota Tangerang Selatan 2023-2026

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	470	470			248.413.305		APBD	DINAS SOSIAL	500				370.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			-		0						500		5.000.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	466			470	470	43.875.000						500		45.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	466			470	470	105.328.430						500		157.500.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	466			470	470	17.150.050						500		15.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	466			20	20	24.000.000						30		36.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			-	-	0						500		10.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	466			470	470	10.535.050						500		15.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	466			470	470	10.535.050						500		15.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	466			470	470	19.558.725						500		25.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	466			470	470	17.431.000						500		25.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			-	-	0						50		10.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	50	50			86.424.825		APBD	DINAS SOSIAL	200				327.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			-		0						200		6.000.000			
b	Penyediaan Permakanan	orang	22			50	50	15.750.000						200		63.000.000			
c	Penyediaan Sandang	orang	22			50	50	17.150.050						200		10.000.000			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	22			20	20	6.000.000						40		27.000.000			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			-	-	0						200		20.000.000			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	22			50	50	10.535.050						200		30.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang	22			50	50	10.535.050						200		30.000.000			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	22			50	50	19.558.725						200		60.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	22			50	50	17.431.000						200		60.000.000			
l	Layanan Rujukan	orang	-			-	-	0						30		9.000.000			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			0	-	0						200		18.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			0	0	0						200		18.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			0	0	0						200		18.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	50	50			90.959.875		APBD	DINAS SOSIAL	200				320.400.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-				0	0						200		2.400.000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			-	-	0						200		18.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	26			50	50	15.750.000						200		63.000.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	26			50	50	17.150.050						200		10.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	26			-	-	0						40		27.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			-	-	0						200		20.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	26			50	50	10.535.050						200		30.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	26			50	50	10.535.050						200		30.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	26			50	50	19.558.725						200		60.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	26			50	50	17.431.000						200		60.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			-	-	0						20		6.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			-	-							200		18.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			-	-							200		18.000.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	170	170			118.224.825		APBD	DINAS SOSIAL	200				251.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			-		0						200		8.000.000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			-		0						200		18.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	161			170	170	53.550.000						200		63.000.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	161			170	170	17.150.050						200		6.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	-			-	-	0						200		10.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			-	-	0						200		10.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	161			170	170	10.535.050						200		15.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	161			170	170	10.535.050						200		15.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			-	-	0						25		7.500.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			-	-	0						10		3.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	161			170	170	19.558.725						200		25.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	161			170	170	17.431.000						200		25.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			-	-	0						200		10.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			-	-	0						200		18.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			-		0						200		18.000.000			
	5	orang	2.708	2.500	2.500			2.947.020.000		APBD	DINAS SOSIAL	2.600				751.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan	orang	2.708			2.500	2.500	747.020.000						2.600		117.000.000			
b	Penyediaan Sandang	orang	-			-	-							2.600		130.000.000			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			1	1	0						2		24.000.000			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	560			500	500	2.200.000.000						600		90.000.000			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	-			0	0							2.600		390.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Kabupaten/Kota																		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	550				472.750.000		APBD	DINAS SOSIAL	600				557.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			550		7.000.000						600		8.000.000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	466			550		48.000.000						600		50.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	466			550		173.250.000						600		189.000.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	466			550		16.500.000						600		18.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	466			50		60.000.000						60		72.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			550		15.000.000						600		20.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	466			550		25.500.000						600		30.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	466			550		25.500.000						600		30.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	-			50		15.000.000						80		24.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	-			50		15.000.000						70		21.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	466			550		30.000.000						600		40.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	466			550		30.000.000						600		40.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			50		12.000.000						600		15.000.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	2.020				3.219.300.000		APBD	DINAS SOSIAL	2.500				4.249.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			2.020		12.000.000						2.500		12.000.000			
b	Penyediaan Permakanan	orang	22			2.020		636.300.000						2.500		787.500.000			
c	Penyediaan Sandang	orang	22					101.000.000						2.500		125.000.000			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	22			400		270.000.000						500		375.000.000			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			2.020		202.000.000						2.500		250.000.000			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	22			2.020		303.000.000						2.500		375.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang	22			2.020		303.000.000						2.500		375.000.000			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			200		60.000.000						500		150.000.000			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			200		60.000.000						500		150.000.000			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	22			2.020		606.000.000						2.500		750.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	22			2.020		606.000.000						2.500		750.000.000			
l	Layanan Rujukan	orang	-			200		60.000.000						500		150.000.000			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	2.020				3.249.300.000		APBD	DINAS SOSIAL	2.500				4.249.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			2.020		12.000.000						2.500		12.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	26			2.020		636.300.000						2.500		787.500.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	26			2.020		101.000.000						2.500		125.000.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	26			400		270.000.000						500		375.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			2.020		202.000.000						2.500		250.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	26			2.020		303.000.000						2.500		375.000.000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	26			2.020		303.000.000						2.500		375.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			200		60.000.000						500		150.000.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			200		60.000.000						500		150.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	26			2.020		606.000.000						2.500		750.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	26			2.020		606.000.000						2.500		750.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			300		90.000.000						500		150.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			2.020		36.000.000						2.500		60.000.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	100				312.125.000		APBD	DINAS SOSIAL	125				379.250.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	-			225		8.500.000						250		9.000.000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	-			225		20.000.000						250		22.500.000			
c	Penyediaan Permakanan	orang	161			225		70.875.000						250		78.750.000			
d	Penyediaan Sandang	orang	161			225		6.750.000						250		7.500.000			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	-			225		12.500.000						250		15.000.000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	-			225		12.500.000						250		15.000.000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	161			225		20.000.000						250		25.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	161			225		20.000.000						250		25.000.000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	-			50		15.000.000						75		22.500.000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	-			20		6.000.000						30		9.000.000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	161			225		30.000.000						250		40.000.000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	161			225		30.000.000						250		40.000.000			
m	Layanan Rujukan	orang	-			225		15.000.000						250		20.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	-			225		22.500.000						250		25.000.000			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	-			225		22.500.000						250		25.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2.708	2.700				783.000.000		APBD	DINAS SOSIAL	2.800				815.000.000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan Permakanan	orang	2.708			2.700		121.500.000						2.800		126.000.000			
b	Penyediaan Sandang	orang	-			2.700		135.000.000						2.800		140.000.000			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	1			2		24.000.000						2		24.000.000			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	560			650		97.500.000						700		105.000.000			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	-			2.700		405.000.000						2.800		420.000.000			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan Target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di Daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, RKPD, Renstra PD sampai ke penjabaran operasional melalui Renja PD dan RKA PD. Dalam rangka mewujudkan Penerapan SPM diperlukan proses integrasi rencana aksi daerah Penerapan SPM terhadap dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga rencana aksi daerah Penerapan SPM dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan, adapun integrasi dimaksud terhadap proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana aksi daerah Penerapan SPM pada RPJMD dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. Strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan Program PD, khususnya dikaitkan dengan Program PD dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra PD dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan PD, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Permasalahan dan isu strategis PD, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi PD dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja PD dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Tujuan dan sasaran PD, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan PD dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. Rencana kerja dan pendanaan PD, khususnya dikaitkan dengan dengan Program, Kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi rencana aksi daerah Penerapan SPM pada Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran melalui sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) terhadap RKA PD. RKPD sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun untuk disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD; dan
 - c. RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja Program dan Kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Dalam rangka memastikan bahwa Target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Kegiatan pemantauan terfokus pada Kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah Kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas terhadap Target yang ditetapkan pada perencanaan Program. Pemantauan yang dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan Kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan Program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola Program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga Kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan Targetnya. *Output* Kegiatan menjadi *input* bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana Program dan Kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang ada dapat dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa Kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang Kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program dan Kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab Kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, lembaga donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki empat fungsi fungsi dalam mengontrol Penerapan SPM yaitu:

- a. Ketaatan, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan jumlah jenis dan mutu layanan SPM.
- c. Pelaporan, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir Kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari Kegiatan atau Program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan Program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah Program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika Program telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Tangerang Selatan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan Target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika Target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi Kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Kebijakan daerah lainnya yang mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

3. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang Urusan SPM?
4. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai Standar Teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
5. Bagaimana respon terhadap permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan Pelayanan Dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
6. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

1. Apakah tim Penerapan SPM telah terbentuk?
2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan PD pelaksana Pelayanan Dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana mengatasi persoalan tersebut?
 4. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan koordinasi? Jika ada, bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah terdapat kendala lintas kelembagaan? Jika ada, bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat permasalahan pada manajemen kerja dalam rangka menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, bagaimana permasalahan dapat diatasi?
 2. Terkait proses Penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apakah terdapat permasalahan yang menghambat Penerapan SPM?
 3. Dalam hal teknis penyediaan sarana dan prasarana SPM maupun penyediaan barang dan jasa, apakah terdapat permasalahan? bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah telah teralokasikan anggaran yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerima?
 2. Bagaimana strategi dan pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah pendanaan SPM menjadi skala prioritas pada penganggaran PD?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang mengacu pada penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? PD kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

- 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya terhadap APBD dalam memenuhi Target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbaskan pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar Pelayanan Dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan Kegiatan pemantauan, karena Kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui Kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu Kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai Kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak Program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan analisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap dari kondisi eksisting dan Target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun Penerapan SPM;
 2. Capaian Target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 3. Analisis gap Target SPM yang ditemukan atas Target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap tahapan SPM dan Bidang Urusan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran?
 2. Bagaimana SPM diposisikan dalam prioritas anggaran?
 3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai Target *output* pada tiap Kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada Program, Kegiatan dan sub Kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan Penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE